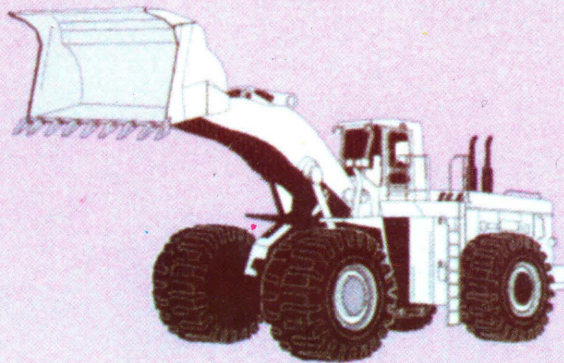


PERUBAHAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH PENYANGGA, STUDI KASUS KADAWANG, JAWA BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBIAYAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI
JAKARTA 1997 / 1998

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

**PERUBAHAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH PENYANGGA :
STUDI KASUS KARAWANG, JAWA BARAT**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGAJIAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI
JAKARTA 1997/1998**

PERUBAHAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH PENYANGGA (Studi Kasus Karawang, Jawa Barat)

Penulis/Peneliti : Zulyani Hidayah

Dewi Indrawati

Penyunting : Kencana Sembiring

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Di terbitkan oleh : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Cetakan Pertama Tahun Anggaran 1997/1998

J a k a r t a

Di cetak oleh : **CV. BUPARA Nugraha - Jakarta**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya merupakan usaha patut dihargai. Pengenalan berbagai aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu, kami gembira menyambut terbitnya buku merupakan hasil dari **Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini**, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini kami harap akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesaling kenalan dan dengan demikian diharapkan tercapai pula tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional kita.

Berkat adanya kerjasama yang baik antara penulis dengan para pengurus Proyek, akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam sehingga di dalamnya masih mungkin terdapat kekurangan dan kelemahan, yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penebitan buku ini.

Jakarta, September 1997

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'ES' followed by a long horizontal stroke.

Prof. Dr. Edi Sedyawati

PRAKATA

Usaha pembangunan nasional yang makin ditingkatkan adalah suatu usaha yang berencana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan kehidupan warga masyarakat Indonesia. Usaha pembangunan semacam ini pada dasarnya bukanlah usaha yang mudah diterapkan. Berbagai persoalan dan kesulitan yang muncul dan dihadapi dalam penerapan pembangunan ini, antara lain berkaitan erat dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia.

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang antara lain ditandai oleh keanekaragaman suku bangsa dengan berbagai budayanya merupakan kekayaan nasional yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya khas yang membedakan jati diri mereka dari suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dengan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu dan antarkelompok.

Berangkat dari kondisi, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini berusaha menemukan, mengkaji, dan menjelaskan berbagai gejala sosial, serta perkembangan kebudayaan, seiring kemajuan dan peningkatan pembangunan. Hal ini tidak bisa diabaikan sebab segala tindakan pembangunan tentu akan memunculkan berbagai tanggapan masyarakat sekitarnya. Upaya untuk memahami berbagai gejala sosial sebagai akibat adanya pembangunan perlu dilakukan, apalagi yang menyebabkan terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.

Percetakan buku "**Perubahan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah Penyangga : Studi Kasus Karawang, Jawa Barat**" adalah salah satu usaha untuk tujuan tersebut diatas. Kegiatan ini sekaligus juga merupakan upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian tentang berbagai kajian mengenai akibat perkembangan kebudayaan.

Penyusunan buku ini merupakan kajian awal yang masih perlu penyempurnaan penyempurnaan lebih lanjut. Diharapkan adanya berbagai masukan yang mendukung penyempurnaan buku ini di waktu-waktu mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini kami sampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Jakarta, September 1997

Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian
dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini



Suhardi

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN..	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A Dasar Pemikiran	1
1. Kota dan Daerah Penyangga	1
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	6
B Permasalahan	8
C Batas Ruang Lingkup	9
D Pendekatan Teoritis	11
E Tujuan dan Manfaat	13
F Metode	14
G Pertanggungjawaban Penelitian	15
H Kerangka Penulisan Laporan	16
BAB II. IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN	19
A. Letak dan Lingkungan Alam	19
1. Kabupaten Karawang	19
2. Daerah Studi Kasus	26
B Kependudukan dan Sumber Daya Manusia	30
C Sosial - Ekonomi	33
1. Sejarah	33
2. Latarbelakang Kebudayaan	37
D Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya	41
E Pembangunan Industri	45

BAB III PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI DAERAH	
PENELITIAN	49
A Dampak Pengeksploitasian Sumber Daya Alam..	49
1. Dampak Ekologis	50
a. Pertanian Sawah	52
b. Perindustrian	58
2. Dampak Sosial	66
B Mobilitas Sosial Penduduk	73
1. Mobilitas Penduduk Asli	73
2. Masalah Panduduk Pendetang	75
C Perkembangan Pendidikan	78
1. Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	80
2. Kebutuhan Tenaga Kerja untuk Industri	81
D Pandangan Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam	83
1. Konsep dan Pengelola Sumber Daya Alam ...	83
2. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kearifan Lingkungan	87
 BAB IV ANALISIS.....	 91
A Pola Hubungan Kota dan Daerah Penyangga	91
B Masa Depan Daerah Penyangga	91
 BAB V KESIMPULAN	 99
 KEPUSTAKAAN	 105
 LAMPIRAN I	 107
 LAMPIRAN II	 109

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Tataguna Lahan Kabupaten Karawang 1994	23
2.	Luas Lahan Sawah Menurut Penggunaan di Tiap Kecamatan di Karawang, 1989-1994	25
3.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Penyebarannya Menurut Kecamatan di Kabupaten Karawang, 1989-1994	31
4.	Jenis Bahan Galian di Kabupaten Karawang, 1993	44
5.	Persentase Investasi di Bidang Industri Kabupaten Karawang, 1995	65

BA B I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Kota dan Daerah Penyangga

Pemusatan kebudayaan di kota-kota merupakan gejala khas dari peradaban modern yang sedang berjalan cepat menuju ke puncaknya. Kenyataan ini nampaknya juga menjadi ciri dari berbagai tingkat peradaban terdahulu. Hal ini terungkap dengan adanya bukti-bukti dari berbagai reruntuhan kota-kota kuno, bahwa kota merupakan pusat kegiatan peradaban yang sesungguhnya (Muller, 1958). Tapi bagaimana proses kelahiran suatu kebudayaan yang mendukung peradaban tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti, karena kebudayaan itu sendiri hanya mungkin timbul jika masyarakatnya memiliki faktor-faktor pendukung, seperti sumber daya alam, kemampuan teknologi, sistem ekonomi yang kuat, sistem politik yang mantap, sumber daya manusia yang cukup dan sebagainya.

Ahli sejarah kebudayaan seperti Gordon Childe mengemukakan pendapatnya, bahwa kunci penentu dari tahap-tahap pertumbuhan kota sebagai wujud dari peradaban dapat dilihat dari tingkat perkembangan teknologi dan ekonominya

(Childe, 1951). Ahli lain ada pula yang beranggapan bahwa hal yang paling mendasar bagi perkembangan kota-kota adalah kecenderungan terpusatnya kegiatan kebudayaan pada suatu tempat, dimana kota merupakan orientasi bagi berbagai aktifitas dari daerah pinggiran sekitarnya. Akan tetapi hampir semua ahli sepakat, bahwa baik kebudayaan maupun aspek teknologi dan ekonomi yang menumbuhkan kota-kota tidak mungkin berkembang ke puncaknya jika tidak didukung oleh sumber daya alam yang cukup. Dengan kata lain perkotaan merupakan suatu kompleksitas sistem kehidupan manusia di dalam mana terkait berbagai unsur yang saling berfungsi satu sama lain, seperti kebudayaan, teknologi, ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sistem kemasyarakatan yang memadai.

Sebagai pusat orientasi kebudayaan bagi daerah-daerah pinggiran (marginal) di sekitarnya, kota memiliki daya sentrifugal yang menarik orang-orang untuk datang dan menetap di dalam kota. Jadi urbanisasi memang telah ada sejak dulu kala, sebagai salah satu gejala adanya kota yang sedang tumbuh. Akan tetapi urbanisasi berskala luas yang terjadi terus menerus merupakan gejala sosial yang penting dalam dua abad terakhir ini. Di mana perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota kecil dan besar berkaitan erat dengan timbulnya industrialisasi berkat kemajuan revolusi teknologi dan ekonomi (Forbes, 1983 : 165).

Sayangnya tidak semua proses urbanisasi berjalan dengan baik, dalam arti memberi keuntungan bagi kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat secara merata. Proses urbanisasi di Dunia ketiga, misalnya, menurut Dean K. Forbes jauh tertinggal di belakang Eropa, karena di sini pemasukan masyarakat pedesaan ke dalam perekonomian dunia malah lebih cenderung mempercepat pelabilan ekonomi desa. Urbanisasi yang terjadi makin mendekatkan desa-desa kedalam jangkauan daya eksploitasi kota. Desa-desa makin mudah dijangkau dan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi kota, sehingga saja telah mempercepat perpindahan penduduk yang permanen dan sementara ke kota,

sehingga menimbulkan transisi mobilitas, tapi juga memaksa daerah pedesaan untuk mengalihkan sumber-sumber daya alamnya untuk mendukung kehidupan kota yang semakin tumbuh dan semakin membutuhkan sumber daya dari daerah sekitarnya.

Pada masa pembangunan sekarang, percepatan perkembangan lingkungan fisik buatan manusia yang paling menonjol adalah pemekaran wilayah perkotaan dan pertumbuhan penduduk urban karena orientasi pemikiran yang bersifat modernisasi. Sesuai dengan determinasi energi, bahwa berapapun usaha manusia mengubah dan memanipulasi energi, namun tidak mungkin dilakukan tanpa mengambilnya dari sumber daya alam sekitarnya. Begitu juga halnya dengan pemekaran dan pertumbuhan daerah perkotaan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya wilayah-wilayah pendukung yang akan dieksploitasi demi kelangsungan sistem kehidupan perkotaan itu sendiri. Dengan demikian dapat dimaklumi, betapa dalam setiap proses pertumbuhan kota, ada sejumlah tempat yang memiliki sumber daya alam tertentu yang "diikat" sebagai daerah penyangga, yaitu daerah yang memberikan dukungan sumber daya bagi kelangsungan sistem kehidupan kota.

Berbeda dengan kota-kota dari zaman peradaban kuno yang dapat lahir karena tujuan pemusatan kegiatan agama dan kekuasaan otokratis, maka pada zaman modern sekarang kota-kota umumnya tumbuh karena kompleksitas kepentingan industrialisasi berkat perkembangan sistem teknologi dan ekonomi moneter (Hoebel, 1958:181). Apapun yang dapat menjadi basis pertumbuhan perkotaan, semuanya memerlukan dukungan dari daerah-daerah penyangga. Penduduk kota perlu bahan makanan, air bersih, pakaian, perumahan, sarana perdagangan, industri, hiburan, peribadatan dan pembuangan limbah. Sudah tentu tidak satu pun bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan tersebut tersedia di dalam kota. Hampir semua sumber daya alamiah untuk itu harus didatangkan dari daerah lain. Lebih khusus lagi harus ada daerah masyarakat kota, seperti air bersih, bahan makanan, bahan bangunan, bahkan juga tenaga kerja manusia.

Jakarta sebagai ibukota Indonesia bukan saja sebagai kota terbesar di Indonesia, tapi dengan penduduk hampir sepuluh juta juga merupakan kota terbesar di Asia Tenggara. Kehidupan masyarakat urban di Jakarta dalam proses perkembangannya sejak awal, bahkan mungkin sejak terbentuknya hanya berupa sebuah perkampungan pelabuhan bagi kerajaan-kerajaan Pasundan di pedalaman Jawa Barat, telah memiliki ketergantungan kepada sumber daya alam dari daerah-daerah pinggirannya. Ketika proses pembangunan makin melonjak cepat daerah pinggiran segera terlanda oleh pemekaran, sehingga luas wilayah yang dicakup mungkin sudah puluhan kali luas wilayah kota Batavia di zaman Belanda dulu.

Proses pemekaran wilayah kota Jakarta pada dasarnya tidak terikat kepada batasan administratif yang ada, dan jumlah masyarakat urbannya juga makin bertambah dalam deret hitung yang mencengangkan. Sementara itu kebutuhannya akan jumlah sumber daya alam dapat dikatakan telah melampaui daya dukung daerah pinggiran, sehingga ketergantungan tersebut secara otomatis dialihkan ke daerah-daerah penyangga, yaitu daerah-daerah kantong yang dijadikan sebagai tepat mengalihkan sebagian beban kota Jakarta. Terutama beban untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam yang selalu meningkat.

Karawang yang berjarak sekitar 80 kilometer dari pusat kota Jakarta adalah salah satu wilayah yang dapat dianggap sebagai "daerah penyangga" bagi kota Jakarta dan masyarakat urbannya. Nampaknya daerah ini termasuk ke dalam radius jangkauan pengaruh perkembangan kota metropolitan, khususnya sebagai penyangga kebutuhannya akan sumber daya alam. Dengan kata lain peranan Karawang sebagai daerah penyangga bagi kota Jakarta telah mengalami perubahan-perubahan yang tidak sedikit sejalan dengan semakin besarnya daya dukung sumber daya alam yang dibutuhkan Jakarta. Daerah Kabupaten Karawang sendiri sejak awal abad yang lalu telah dikenal sebagai salah satu "lumbung padi" di Jawa Barat, berkat adanya lahan perwasaannya yang produktif dengan dukungan dan pengembangan teknologi

pengairan. Karena jaraknya yang relatif dekat serta memiliki akses transportasi yang lancar ke ibukota, maka surplus beras yang dihasilkan Karawang telah menjadi salah satu sumber daya alam vital yang dimanfaatkan penduduk Jakarta.

Peranan Karawang sebagai penghasil beras untuk memenuhi kebutuhan kota besar seperti Jakarta juga didukung oleh catatan sejarah. Betapa daerah ini mulai tumbuh sebagai daerah pertanian sawah irigasi sejak Abad ke-17, yaitu ketika sejumlah petani Jawa Timur ditempatkan di sana oleh Sultan Agung Haryokusumo dari Mataram. Sultan ini terkenal sebagai salah seorang raja Jawa yang menentang penjajahan Belanda sejak awal sekali. Penempatan pasukan Mataram di bawah pimpinan Rangga Gede di Karawang sebenarnya ini adalah salah satu strategi perang Sultan Agung untuk merebut Batavia dari tangan VOC Belanda. Sultan Agung ingin menjadikan Karawang sebagai basis pertahanan sekaligus sebagai daerah pemasok bahan makan bagi laskarnya yang akan mengepung Batavia. Pengepungan tersebut mungkin akan terjadi selama berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Menjadikan Karawang sebagai "lumbung padi" memang tepat sekali untuk strategi tersebut. Namun ketika rencana Sultan Agung gagal, dan Karawang dapat direbut oleh Belanda, daerah tersebut sebaliknya menjadi daerah pemasok kebutuhan beras bagi kota Batavia, terus berlanjut sampai kini setelah menjadi ibukota Republik Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya daerah Karawang tidak hanya sebagai daerah penyangga bagi Jakarta dalam hal sumber bahan makanan pokok, tetapi sudah berperan dalam banyak hal guna menunjang kelangsungan pembangunan Jakarta sebagai ibukota. Karawang akhirnya juga berkembang sebagai daerah "satelit" bagi kota Jakarta. Karena di daerah ini sekarang telah banyak pula didirikan pabrik yang akan memasok berbagai barang industri dengan Jakarta sebagai pusatnya. Sebagian tanahnya diambil alih oleh pengusaha dari Jakarta untuk dijadikan kawasan industri, lapangan golf, real-estate (perumahan mewah),

perumahan sederhana. Sebagian sumber daya alamnya di bawa ke Jakarta untuk mendukung pembangunan fisik, seperti pasir, batu kali, dan tanah liat yang diolah menjadi batu bata dan genteng untuk pembangunan gedung kantor dan rumah di Jakarta. Selain itu tidak bisa pula dipungkiri bahwa Karawang sebagai daerah penyangga juga memberikan sumber daya lain, berupa tenaga kerja manusia bagi kota Jakarta.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Menurut banyak ahli ilmu lingkungan titik awal dari meningkatnya kegiatan manusia mengeksploitasi sumber daya alam adalah pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk, mobilitas gerak pindah penduduk yang tinggi, seperti urbanisasi, dan struktur usia penduduk yang kebanyakan berusia muda, sehingga mengakibatkan meningkatnya permintaan akan barang dan jasa. Dari sudut pendekatan ekonomi Profesor Emil Salim menyebutkan, bahwa perubahan struktur ekonomi dari yang masih menitikberatkan usaha mengolah bahan mentah ke arah struktur ekonomi yang mengarah kepada kegiatan menghasilkan barang jadi, dan disertai dengan perluasan usaha ekonomi, akan mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam, dan pada akhirnya akan menyebabkan semakin berubahnya lingkungan alamiah menjadi lingkungan buatan manusia. (Salim, 1994 : 13).

Pernyataan di atas dapat dipahami, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong meningkatnya tawaran akan tenaga kerja. Masalah ini harus disambut dengan keharusan menyediakan lapangan kerja yang seimbang, yaitu dengan cara memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, baik di sektor yang telah lama tersedia seperti pertanian, maupun sektor yang harus dibangun seperti industri, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan lain-lain.

Keterbatasan kesempatan dan lapangan kerja telah mendorong orang yang berasal dari daerah yang padat penduduk untuk mencari lahan baru ke tempat yang lebih jarang penduduknya

Kalaupun masih tetap bertahan di daerah asalnya seperti di Jawa, mereka akan melaksanakan intensifikasi usaha-usaha yang sudah ada. Sebagian dari usaha intensifikasi di bidang pertanian di Jawa malah disebut-sebut sebagai telah mengalami "involusi pertanian" (Geertz, 1976). Akibatnya adalah meningkatnya tekanan besar pada sumber daya alam yang sebenarnya sudah digarap secara maksimal, terutama di Pulau Jawa, dan dimulainya perusakan lingkungan yang mengandung sumber daya alamiah yang beragam karena pembukaan hutan-hutan di luar Pulau Jawa.

Mengingat tekanan pada sumber daya alam bermula dari pertambahan jumlah penduduk melebihi daya dukung yang sudah ada, maka sudah sewajarnya diusahakan pengendalian pertambahan penduduk agar mencapai tingkat yang stabil, persebaran yang lebih merata, dan peningkatan kualitas kehidupan penduduk. Sementara itu keutuhan fungsi sumber daya alam sendiri harus dipelihara dengan mengelola keberlanjutannya, mengendalikan pencemaran dan pengrusakannya, mencegah terjadinya penyusutan persediaan sumbernya, menjaga agar tingkat regenerasi sumber tersebut tidak terlampaui, menggunakan cara-cara pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dan pengendalian limbah bahan beracun dan berbahaya.

Tekanan pertambahan jumlah penduduk yang besar pada sumber daya alam berupa tanah, akan mengakibatkan tumbuhnya wilayah lahan kritis yang tidak mampu lagi menumbuhkan tanaman. Termasuk dalam kategori ini areal bekas penambangan dan penampungan bahan mineral, di mana tanahnya rusak parah dan menderita sehingga berubah menjadi lahan kritis. Perubahan baku mutu lingkungan yang semula bersifat alamiah menjadi lingkungan buatan yang dikembangkan menurut kebutuhan dan kepentingan manusia juga dapat berubah menjadi lahan kritis jika dirubah terlalu jauh dari fungsinya yang sesungguhnya. Misalnya perubahan lingkungan rawa-rawa yang banyak dihuni oleh udang, ikan bandeng, kepiting, dan jenis hewan air payau lainnya, jika

dirubah menjadi tambak udang tanpa menyisakan bagian tertentu untuk memulihkan peralihan bentuk tersebut, nantinya akan berubah menjadi lahan kritis.

Proses pembangunan yang merombak sumber daya alam, yang mempunyai rasa tidak peduli menjadikan, lingkungan buatan manusia menimbulkan akses berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena itu dalam mengolah sumber daya alam peranan masyarakat dan pemerintah daerah setempat sangat penting. Sumber daya alam berada di daerah, sehingga pengolahan sumber daya alam sejalan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Nomor 4 tahun 1982, dimana masyarakat berhak berperanserta dalam pengembangan lingkungannya. Karena itu sangat penting adanya pemberian kesempatan bagi peranserta masyarakat dalam mengembangkan lingkungannya, antara lain melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

B. PERMASALAHAN

Berbagai faktor sumber daya alam pendukung pembangunan yang disumbangkan Karawang itu tentu terkait erat dengan sistem pengelolaan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Berbagai masalah di dalam lingkungan daerah penyangga ini timbul sebagai dampak dari peningkatan kebutuhan dan permintaan kota Jakarta.

Menurut pendekatan ilmu lingkungan, daerah Karawang memiliki ekosistem sendiri yang berjalan sesuai dengan daur-ulang kehidupan habitatnya. Menempatkan Karawang sebagai daerah penyangga Jakarta cenderung bersifat subyektif, seolah-olah Karawang hanyalah obyek eksploitasi bagi kepentingan "raksasa kota" yang rakus akan sumber daya alam. Secara wajar Karawang harus dilihat sebagai sebuah lingkungan yang memiliki potensi

kehidupan yang terkait dengan berbagai kepentingan, baik bagi kepentingan kelangsungan hidup penduduknya sendiri, maupun kelangsungan hidup penduduk urban di kota Jakarta dan pinggirannya (JABOTABEK).

Berdasarkan berbagai fakta yang terungkap dari berbagai acuan di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian, yaitu tentang apa saja bentuk daya dukung alamiah yang dipunyai Karawang, dan bagaimana dampak perubahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah Karawang terhadap perannya sebagai daerah penyangga bagi kota Jakarta. Secara ekologis yang dihadapi adalah masalah apakah daya alam Karawang masih dapat menjadikannya sebagai daerah penyangga, atau sebaliknya telah sampai kepada batas daya dukung yang hanya bisa ditolerir untuk kebutuhan habitatnya sendiri. Dalam hal ini diasumsikan bahwa peran sebagai daerah penyangga hanya mungkin diemban jika daerah yang bersangkutan memiliki "surplus" yang dapat diberikan kepada daerah yang disangga setelah lebih dulu memenuhi kebutuhannya sendiri.

C. BATAS RUANG LINGKUP

Sebenarnya penelitian ini mencakup Kabupaten Karawang secara keseluruhan, akan tetapi untuk menampakkan fakta secara lebih ditil dan mendalam, maka lingkungan fisik yang menjadi bahan studi kasus ini adalah suatu wilayah kecamatan di mana unit sosialnya (yaitu penduduk setempat) mengalami secara langsung interaksi dengan sumber daya alam yang menjadi obyek "penyangga" bagi kota Jakarta. Dengan kata lain penelitian kasualitas ini dilakukan di suatu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Karawang, di mana penduduknya telah mengalami berbagai dampak akibat peningkatan peran daerah mereka sebagai penyangga kebutuhan kota. Ciri-cirinya antara lain : Sebagian sumber daya alamnya digunakan untuk memasok kebutuhan kota besar ; telah berdiri berbagai sarana industri yang menjadi bagian

dari jaringan ekonomi kota Jakarta; penduduknya telah mengalami percampuran dengan berbagai suku bangsa pendatang; memiliki akses transportasi yang lancar dan beragam ke kota besar.

Setelah melakukan studi kelayakan di lapangan, maka tim peneliti telah memutuskan untuk menjadikan wilayah Kecamatan Klari sebagai daerah penelitian studi kasus. Pilihan ini berdasarkan kenyataan, bahwa ciri-ciri di atas dapat dipenuhi dengan baik oleh kecamatan ini. Kecamatan Klari merupakan wilayah yang dianggap dapat mewakili ciri Karawang secara umum. Daerah ini mencakup dua kondisi geografis khas pertanian sawah Karawang, yaitu sebagian terdiri atas tanah pertanian sawah irigasi yang secara teknis memiliki kemampuan produksi yang tinggi, karena diairi oleh saluran irigasi yang lancar, sehingga dapat ditanami dua kali setahun. Sebagian lagi masih berupa tanah persawahan tradisional yang masih tergantung kepada musim dan curah hujan, secara teknis tanah seperti ini dianggap tidak produktif karena hanya bisa ditanami satu kali setahun, disertai dengan risiko buruknya panen.

Kecamatan ini dilintasi langsung oleh jalur transportasi darat yang penting, yaitu jalan kereta api, jalan raya propinsi, dan jalan tol Cikampek. Ketiga jalur transportasi darat ini tergolong paling sibuk dan ramai, karena menghubungkan kota Jakarta dengan propinsi-propinsi lain di sebelah timur. Orang dan barang yang bepergian lewat darat ke dan dari arah timur Jakarta mau tidak mau harus melewati salah satu dari prasarana transportasi tersebut. Keadaan lahannya yang sebagian tidak produktif untuk pertanian serta adanya akses transportasi yang lancar menyebabkan pertumbuhan kegiatan industri di Kecamatan Klari cukup menjadi alasan untuk menjadikannya sebagai daerah sampel bagi studi kasus dalam penelitian ini. Gambaran lebih jauh mengenai potensi wilayah Kecamatan Klari ini akan diterangkan lebih jelas dalam Bab II tentang Identifikasi Daerah Penelitian di belakang.

Sumber daya alam yang diambil sebagai bahan studi dari daerah sampel ini adalah segala sesuatu yang berasal dari lingkungan geografisnya, seperti air, tanah dan barang tambang. Sedangkan batasan informan adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat yang mengalami sendiri dan memahami dengan baik perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan mereka sejak paling kurang tiga puluh tahun yang lalu.

D. PENDEKATAN TEORITIS

Percepatan pembangunan fisik Indonesia selama tiga dekade terkhir ini sekaligus telah memberi keleluasaan luas bagi perkembangan ilmu-ilmu pembangunan, seperti ekonomi dan teknologi industri. Tahap awal dari pembangunan yang merupakan pembentukan dasar bagi peralihan kehidupan masyarakat dari sistem mata pencaharian yang berbasis kebudayaan pertanian kepada sistem yang berbasis kebudayaan industri, nampaknya paling banyak didampingi oleh pertimbangan-pertimbangan dari ilmu ekonomi pembangunan. Antara lain karena pemusatan perhatian politis kepada kebutuhan untuk mengalihkan usaha pertanian tradisional yang rendah produktifitasnya kepada kegiatan industri yang jauh lebih tinggi produktivitasnya.

Menurut Rastow (1958) negara-negara di dunia berkembang melalui beberapa tahap perkembangan, dimulai dari tahap terbelakang, sedang membangun, dan tahap "lepas landas". Setelah menjalankan program pembangunan jangka panjang secara terencana selama lima kali tahap "Pelita" (pembangunan lima tahunan) Indonesia menganggap diri telah siap untuk masuk ke tahap lepas landas seperti telah dialami oleh negara-negara maju di Eropa.

Gerak pembangunan tersebut dianggap paling banyak dipengaruhi oleh teori modernisasi yang didasarkan kepada asumsi transisi linier dari suatu masyarakat terbelakang, tidak berdiferensiasi, pra-rasional dan bersifat *gemeinchart* menuju

kepada masyarakat dengan kehidupan sosial modern, berdiferensiasi, birokratis, rasional dan lebih mengutamakan sikap hidup gessellschaft (Rimmer and Forbes 1982:199).

Teori modernisasi ini memayungi pula teori-teori modernisasi lain, seperti teori modernisasi difusionis dengan asumsi bahwa gerak pembangunan untuk mencapai kehidupan modern tersebut bersifat polarisasi dan efek menyebarnya mengikuti model pusat-pinggiran. Berdasarkan teori ini pembangunan suatu wilayah hanya mungkin dilakukan dengan memanfaatkan wilayah lain yang kalah kuat, dimana sumber daya diambil untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah pusat dari daerah yang kalah kuat dan berada di pinggiran tersebut (Forbes, 1983:67). Hal ini sangat kentara dalam studi kasus pemekaran dan pertumbuhan kota Jakarta yang diutamakan sebagai "pusat" pembangunan, di mana pembangunan itu sendiri harus didukung oleh daerah-daerah penyangga yang tergolong sebagai daerah pinggiran.

Akan tetapi konsekuensi khusus dari penerimaan teori ini menurut Forbes (1983 : 69) adalah diakuinya pergeseran yang nyata dalam makna pembangunan. Karena di sini pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai kriteria utama pembangunan. Untuk mencapai tahap tinggal landas seperti negara-negara maju negara berkembang harus lebih dulu mendirikan basis produksi melalui akumulasi, dan setelah tahap ini tercapai baru menghadapi masalah-masalah pemerataan. Selama akumulasi pembangunan di pusat-pusat (nota bene adalah perkotaan dan pusat pemerintahan) diharapkan akan terjadi efek menetes kebawah (trickle-down effect) yang dianggap dapat menjamin terjadinya pemerataan, dibarengi dengan tindakan koreksi dari birokrasi untuk mempercepat proses tersebut. Nyatanya proses menetes kebawah terlalu sedikit dan lambat sekali, selain itu pemerintah enggan untuk melakukan pemerataan, sebaliknya yang terjadi adalah pemusatan pertumbuhan dengan mengenyampingkan pertimbangan pemerataan.

Berkenaan dengan studi kasus kita di daerah Karawang sebagai daerah penyangga bagi kota Jakarta teori polarisasi di atas harus kita pandang dengan kritis dan perlu dibuktikan. Dengan kata lain studi kasus yang akan dilakukan ini akan berusaha membuktikan kebenaran teori modernisasi difusionis dengan model polarisasi tersebut diatas, dengan mempergunakannya sebagai pertanyaan pokok penelitian. Karena peranan daerah penyangga yang seakan-akan hanya menjadi "sapi perahan" bagi kota sebagai pusat pembangunan mungkin saja terjadi lebih berkeadilan, antara lain karena penduduk miskin di daerah penyangga mendapat lapangan kerja yang terbuka luas di kota, hasil produksi mereka dapat dipasarkan di kota dan sebagainya.

Akan tetapi untuk menjamin obyektifitas penelitian itu sendiri, terutama karena penelitian sangat berkaitan dengan kelestarian lingkungan, maka bagaimanapun juga akan dipakai pula teori-teori kelestarian lingkungan, dari ilmu ekologi. Terutama teori keseimbangan ekosistem, dimana setiap unsur yang ada di dalamnya saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga perubahan yang dialami oleh satu unsur akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Sementara itu tidak dapat pula diabaikan berlakunya teori-teori perubahan sosial untuk mengolah hasil penelitian yang bersifat kuantitatif tersebut, karena pada akhirnya modernisasi dan perubahan ekologi akan mempengaruhi pola-pola tindakan sosial-budaya masyarakat yang menjadi bagian dari habitat ekosistem daerah penyangga tersebut.

E. TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan utama dari penelitian kasus ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan sosial ekonomi yang terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan yang menjadi penyangganya, berkenaan dengan besarnya kepentingan kota terhadap sumber daya alam yang terdapat di daerah yang dianggap

sebagai "penyangga" tersebut. Tujuan lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pola-pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah penyangga.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh dan bagaimana peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah penyangga.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh ketergantungan kota terhadap sumber daya alam daerah penyangga, sebaliknya bagaimana pula ketergantungan daerah penyangga terhadap kota.
4. Untuk mengetahui dampak-dampak polarisasi pembangunan di perkotaan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di daerah penyangga.

F. METODE

Berkenaan dengan acuan kepada pendekatan geografi pembangunan, ekologi dan sosial-budaya di atas maka penelitian harus memanfaatkan metode perolehan data secara kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Metode kuantitatif terutama digunakan untuk mengolah data sekunder yang dapat diperoleh dari sumber-sumber informasi resmi setempat, baik berupa monografi daerah, maupun laporan pembangunan tahunan di daerah penelitian. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan pokok yang diperoleh secara *purposive sampling*.

Dengan demikian penelitian dilakukan melalui dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik survie untuk memperoleh data kuantitatif primer dari lapangan, dan data kuantitatif sekunder dari pusat-pusat dokumentasi dan publikasi milik Pemerintah Daerah. Bahan kuantitatif ini akan menjadi basis pembuktian kuantitatif dan tabularis dalam analisis nanti. Kedua adalah teknik wawancara mendalam dan pengamatan lapangan untuk memperoleh data kualitatif. Data kualitatif ini juga dapat diperoleh dari berbagai

bahan bacaan sebagai acuan yang memang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Bahan-bahan kualitatif ini nanti akan menjadi basis argumentasi dalam menguji kebenaran hipotesis dari teori-teori yang dipakai.

G. PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Walaupun penelitian ini ingin mengungkapkan perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam di daerah Kabupaten Karawang, akan tetapi dalam pelaksanaan pengumpulan data diarahkan kepada studi-studi kasus. Penajaman terhadap studi kasus dilakukan dengan memilih sampel kecamatan dan desa pengamatan. Dalam penelitian ini tim peneliti secara purposive telah memilih Kecamatan Klari sebagai sampel, dengan beberapa desa di wilayah itu sebagai obyek studi kasus. Jadi, dalam menguraikan masalah Kabupaten Karawang secara umum argumentasi didukung dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadi di daerah sampel.

Usaha untuk memperoleh data sekunder dari kantor-kantor pemerintah daerah ternyata tidak semudah yang diduga. Kesulitan sebenarnya terjadi pada tingkat paling bawah, yaitu di desa-desa. Catatan-catatan ataupun laporan-laporan mengenai potensi dan perubahan potensi desa yang harus dibuat dan disediakan di Balai Desa umumnya tidak memuaskan.

Kecuali data kependudukan yang diperoleh lewat sensus, maka data-data sekunder mengenai potensi dan perubahan potensi desa-desa di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang sulit untuk dipercaya, antara lain karena tidak menunjukkan batas obyektif yang dihitung, dan tidak mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi akibat pembangunan yang demikian dratis. Di Kecamatan Klari misalnya jarang sekali ada desa yang memiliki data potensi desa yang diisi lengkap setiap tahun. Buku data desa yang diberikan kepada peneliti selain banyak yang tidak diisi sebagaimana mestinya, cara pengambilan datanya juga diragukan.

Masalah ini tentu saja berpengaruh sampai ke tingkat kecamatan. Kita akan heran bagaimana pihak kecamatan dapat memberikan laporan daerah-daerah tanpa dukungan dari data desa yang tepat. Hal inilah yang menyebabkan penelitian ini tidak mencantumkan tabel-tabel statistik desa dan kecamatan.

H. KERANGKA PENULISAN LAPORAN

Sebagaimana layaknya, laporan hasil penelitian ini dimulai dengan mengemukakan segala hal yang menjadi pokok-pokok pemikiran pelaksanaannya, yaitu pada BAB I sebagai bagian Pendahuluan. Bab ini memuat hal-hal seperti : (a) latar belakang penelitian dan penulisan, (b) permasalahan yang akan dibahas dan yang menjadi subyek dari penelitian ini, (c) pendekatan teoritis yang menjadi kerangka pemikiran, (d) batasan ruang lingkup dari masalah, sampel daerah dan sampel informan, (e) tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, (f) metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai bahan bukti dan argumentasi bagi setiap pernyataan, (g) pertanggungjawaban penelitian dan (h) penulisan laporannya.

Pada BAB II dikemukakan berbagai data dan informasi mengenai potensi daerah penelitian, yaitu Kebudayaan Karawang secara umum, dan Kecamatan Klari secara khusus, serta berbagai kasus yang berkaitan dengan masalah. Adapun urutan uraiannya disusun sebagai berikut : (a) letak dan lingkungan alam Kabupaten Karawang, dan Kecamatan Klari yang menjadi sample secara khusus, dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya, (b) gambaran mengenai kondisi dan perubahan pola kependudukan, (c) kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, (d) potensi sumber daya alam Kabupaten Karawang dan pola pemanfaatannya, (e) kegiatan pembangunan industri dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial-ekonomi penduduk setempat.

Pada BAB III disampaikan bagaimana perubahan kehidupan sosial-ekonomi Kebudayaan Karawang secara umum, berkenaan dengan aspek-aspek : (a) dampak pengeksploitasian sumber daya alam terhadap masyarakat dan kelestariannya, (b) mobilitas sosial penduduk akibat berbagai perubahan di lingkungannya, (c) perkembangan kualitas pendidikan sebagai tanggapan masyarakat terhadap perubahan lingkungannya, (d) pandangan masyarakat setempat terhadap potensi dan kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungannya, kemudian juga mengenai (e) bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan alam dan sosialnya.

Semua hal seperti tersebut dalam BAB II dan BAB III di atas akan dianalisis pada BAB IV, dengan membatasinya menjadi dua hal pokok, yaitu : (a) Pola Hubungan Kota dan Daerah penyanggah, dan (b) Masa Depan daerah Penyanggah.

Akhirnya hasil penemuan di lapangan akan disampaikan dalam BAB V yang merupakan bagian penutup atau kesimpulan. sebagai pendukung berbagai pernyataan disampaikan pula Daftar Bahan Bacaan yang digunakan. Di bagian belakang akan dilampirkan Pedoman Pengumpulan Data serta daftar informan yang ikut memberikan sumbangannya berupa informasi dan keterangan lainnya.

BAB II

IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN

A. LETAK DAN LINGKUNGAN ALAM

1. Kabupaten Karawang

Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang terletak antara $107^{\circ} 02' - 107^{\circ} 40'$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 56' - 6^{\circ} 34'$ Lintang Selatan. Menurut tata letaknya kedudukan Kabupaten Karawang ini termasuk salah satu Kabupaten yang dekat sekali dengan Jakarta, Ibukota Republik Indonesia. Kota-kota lain yang dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap kedudukan geografis, ekonomi, dan sosial-budaya Karawang adalah kota Bandung dan Cirebon. Hubungan ke kota Bandung terutama karena ikatan administratif pemerintahan, karena Karawang yang terletak di propinsi Jawa Barat beribukota ke Bandung. Sedangkan hubungan ke Cirebon lebih disebabkan kontak budaya, khususnya lewat penyebaran agama Islam sejak beberapa abad yang lalu.

Sebagian wilayahnya mencakup daerah dataran rendah dan pesisir utara Jawa Barat. Bersama-sama dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Jawa, karawang juga dikenal sebagai daerah Pantura (Pantai utara Jawa) yang sering disorot karena peranan dan dinamika sosialnya yang cukup mencolok. Seperti diketahui dataran rendah bagian utara Pulau Jawa sejak dulu

merupakan daerah pelintasan bagi perhubungan antara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan sampai sekarang telah tumbuh menjadi daerah pelintasan transportasi yang paling ramai di Indonesia. Kabupaten Karawang terletak di jalur transportasi lintas Jawa, khususnya menghubungkan Jakarta di sebelah barat dengan Surabaya di ujung timur (lihat Peta 1).

Karawang dilewati oleh jalan raya antar propinsi yang telah dibangun sejak zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Daendles (1798 - 1800), serta jalur rel kereta-api Jakarta - Cirebon dan Jakarta - Bandung, terus berlanjut sampai ke Surabaya dan Banyuwangi di timur. Selain itu Kabupaten Karawang sekarang telah dilintasi pula oleh jalan tol yang mulus dan lebar dari Jakarta sampai ke Cikampek. Potensi prasarana transportasi berupa ruas jalan negara, jalan tol dan jalan kabupaten di Karawang dapat dirinci sebagai berikut :

- Jalan negara 50,55 km
- Jalan tol 28,60 km
- Jalan propinsi 38,07 km
- Jalan Kabupaten 902,60 km

Luas wilayah administrasi Kabupaten Karawang adalah 175.327 Ha, atau lebih kurang 3,73% dari luas wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Bentuk permukaan tanah wilayah Kabupaten Karawang sebagian besar berupa dataran rendah yang relatif rata dengan variasi ketinggian antara 0 - 50 meter di atas permukaan laut. Hanya sebagian kecil di bagian selatan yang berbentuk tanah bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian bervariasi antara 50 - 1200 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dilewati

oleh aliran Sungai Citarum dan Cilamaya yang memotong dari arah selatan ke utara. Kedua sungai inilah yang diandalkan untuk mempertahankan fungsi Karawang yang dikenal sebagai salah satu "lumbung padi nasional". Pada masa sekarang daya irigasi yang terbatas dari kedua sungai tersebut telah ditingkatkan dengan membendung dan mengalirkan airnya melalui saluran-saluran pengairan teknis buatan, dapat mengalirkan sampai jarak berpuluh-puluh kilometer ke lahan persawahan di Karawang dan sekitarnya.

Sesuai dengan keadaan permukaan tanahnya, maka sebagian besar tanah di Kabupaten Karawang memiliki kemiringan 0° - 3° atau sekitar 80,44% dari luas wilayah. Tanah dengan kemiringan ini meliputi wilayah Kecamatan Batujaya, Cilamaya, Pedes, Rawamerta, lamahabang, Tempuran, dan sebagian tanah di Kecamatan Cikampek, Jatisari, Klari, Karawang, Rengasdengklok, Telagasari dan Telukjambe. Tanah dengan kemiringan 3° - 15° sekitar 8,9%, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cikampek, Klari, Telukjambe, dan Pangkalan. Tanah dengan kemiringan 15° - 45° dan lebih dari 45° adalah sekitar 10% dari luas wilayah, yaitu di sebagian Kecamatan Pangkalan dan Telukjambe.

Dataran rendah di sekitar pantai utara terbentuk dari tanah endapan (sediman) yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan lumpur dari laut dan hanyutan aluvium vulkanik dari hulu. Dataran dibagian tengah dan selatan merupakan tanah perbukitan yang dibentuk oleh batuan sedimen yang terdiri dari lempung, andesit, batu, pasil, napal, dan dolonit. Jenis tanah yang umumnya dijumpai di Karawang bagian pesisir terdiri atas jenis alluvial, regosol kelabu, regosol coklat. Tanah jenis asose alluvial kelabu dan coklat terdapat di sepanjang aliran sungai Citarum Cilamaya. Sedangkan komposisi podsolik merah kekuningan, podsolik merah dan regosol terdapat di Kecamatan Pangkalan.

Bahan tambang dan mineral yang terdapat dalam bumi karawang pada umumnya jenis mineral non-metal. Minyak bumi dan gas alam terdapat di wilayah Kecamatan Batujaya, Pedes, Telukjambe, dan Cilamaya. Gips, kapur dan batukali terdapat di Kecamatan Pangkalan. Pasir terdapat di Karawang, Klari, Telukjambe dan Rengasdengklok.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Karawang masih didominasi oleh peruntukan lahan sawah (baik sawah irigasi, maupun tadah hujan), yaitu sekitar 99.506 Ha (tahun 1989), kemudian menjadi 98.007 (tahun 1990), dan 96.289 Ha (pada tahun 1994) atau sekitar 52,52% dari luas wilayah Karawang. Disini terlihat betapa luas lahan persawahan di Kabupaten Karawang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Kalau dilihat dari lahan pertanian secara keseluruhan maka luas lahan yang "produktif" bagi pertanian tersebut termasuk tanah tegalan (lahan pertanian kering) seluas 5.959 Ha, kebun campuran seluas 14.149 Ha, dan perkebunan seluas 893 Ha (Sensus Pertanian Karawang 1994).

Peranan daerah Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi pada masa sekarang memang mengandalkan daya dukung sumber daya alam, yaitu aliran air sungai yang dimanfaatkan melalui bendungan dengan saluran dan pintu airnya. Tidak heran jika pada lambang pemerintahan daerahnya pertanian dengan irigasi teknis ini dilambangkan dengan butir padi, pintu air, sawah, dan rawa. Luas persawahan teknis di Kabupaten Karawang kurang lebih 59% dari luas wilayahnya, dan memberikan kontribusi sebesar 23% bagi pengadaan beras Jawa Barat (dan DKI Jakarta).

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang penggunaan lahan di wilayah Kabupaten ini dapat dirinci sebagai berikut .

TABEL 1
TATAGUNA LAHAN KABUPATEN KARAWANG 1994

Peruntukan Lahan	Luasnya	% Luas Wilayah
Perumahan/Pemukiman	20.239 Ha	11,54 %
Industri	1.325 Ha	0,76 %
Persawahan	96.289 Ha	52,52 %
Tegalan	5.959 Ha	3,40 %
Kebun campuran	14.149 Ha	8,67 %
Perkebunan	893 Ha	0,51 %
Hutan	15.666 Ha	8,94 %
Danau/Situ/rawa	40 Ha	0,02 %
Tambak/kolam	12.106 Ha	6,90 %
Semak/alangalang	2.158 Ha	1,23 %
Lain-lain	6.499 Ha	3,71 %
J u m l a h	175.327 Ha	100,00 %

Iklm di daerah Karawang juga dipengaruhi oleh angin muson, di mana tiupan angin yang kencang terjadi pada akhir tahun. Pada bulan Januari - April bertiup angin Muson Barat Laut, sedangkan pada musim kemarau (Mei - Agustus) bertiup angin Muson Tenggara. Wilayah curah hujan di Karawang dapat dibagi tiga, yaitu :

1. Wilayah Utara dengan curah hujan rata-rata 1000 - 2000 mm per tahun
2. Wilayah Tengah dengan curah hujan rata-rata 2000 - 2500 mm per tahun
3. Wilayah Selatan dengan rata-rata curah hujan antara 2500 - 3000 mm pertahun.

Sumber daya alam berupa air di Kabupaten Karawang sebenarnya cukup besar, karena daerah ini dilalui oleh Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. Selain itu ada pula dua sungai yang lebih kecil, yaitu Sungai Cibeet yang

merupakan anak dari Sungai Citarum, dan Sungai Cilamaya. Keadaan permukaan air tanah di bagian utara Karawang sebagian besar dangkal, dan sangat terpengaruh oleh intrusi air laut sehingga terasa asin dan payau, akibatnya kurang baik untuk diminum. Di bagian utara ini air minum hanya mungkin digali sumur artesis sampai kedalaman 50 meter, itupun hanya mungkin ditempat-tempat tertentu.

Di bagian selatan sebaliknya air sungai tidak bisa mengairi bagian-bagian yang lebih tinggi dari permukaan air sungai, sehingga sejak dulu kala hanya mungkin dimanfaatkan sebagai tanah pertanian pada musim hujan saja. Di Karawang bagian selatan ini banyak ditemukan tegalan dan persawahan tadah hujan yang sangat tergantung kepada musim hujan. Keadaan yang kurang menguntungkan bagi pertanian ini dapat ditanggulangi setahap demi setahap, setelah sejak akhir zaman Belanda dibangun beberapa bendungan di bagian hulu Sungai Citarum. Seperti bendungan walahar di Kecamatan Klari yang dibangun tahun 1911 dan mulai berfungsi pada tahun 1925. Bendungan ini mengalirkan air ke saluran-saluran irigasi primer ke daerah-daerah yang dulu hanya mengandalkan air hujan. Sejak itu daya dukung Karawang sebagai daerah penghasil beras terbesar di Indonesia tetap berlanjut, antara lain karena produksi bisa dilaksanakan di sebagian wilayah minimal dua kali setahun, dan tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada musim hujan.

Dari tabel luas dan tataguna lahan di atas terlihat bahwa lahan yang masih mengandalkan curah hujan pada musimnya tinggal sekitar 3,5 %. Akan tetapi berkurangnya lahan pertanian yang dianggap kurang produktif pada masa belakangan ini banyak disebabkan pengalihan fungsinya menjadi lahan industri, perumahan dan rekreasi.

Pengembangan daerah Karawang sebagai salah satu daerah tujuan wisata alam telah pula teridentifikasi. Di kabupaten ini terdapat obyek kunjungan wisatawan yang cukup asri, antara lain: tiga buah obyek wisata pantai, tiga buah obyek wisata hutan, tiga buah obyek wisata alam dan empat buah obyek wisata sejarah.

TABEL 2.
LUAS LAHAN SAWAH MENURUT PENGGUNAAN
DI TIAP KECAMATAN, DI KABUPATEN KARAWANG,
TAHUN 1989-1994

Kecamatan	Irigasi Teknis	Irigasi setengah teknis	Irigasi Sederhana, PU dan Non-PU	Tadah Hujan	TanahSawah/ Lebak/ Polder	Jumlah Lahan Sawah
Pangkalan	-	817	2.528	927	-	4.272
Telukjambe	3.440	202	-	527	117	4.286
Klari	3.427	-	-	375	-	3.802
Cikampek	1.066	634	199	129	-	2.028
Jatisari	8.415	-	-	130	-	8.545
Cilamaya	7.316	1.565	781	-	-	9.662
Lemahabang	3.798	-	-	-	-	3798
Telagasari	3.925	-	-	-	-	3.925
Karawang	4.639	-	-	-	-	4.639
Rawamerta	4.604	-	-	-	-	4.604
Tempuran	7.655	569	-	-	-	8.184
Rengasdengklok	9.731	-	-	290	-	10.021
Pedes	7.520	-	-	213	-	7.733
Batujaya	9.388	-	1.024	177	-	10589
Pakisjaya	1.872	171	646	477	-	3.166
Cibuaya	9.388	-	-	502	-	4.052
Tirtamulya	2.672	62	-	-	-	2.689
Jumlah	82.973	3.980	5.178	3.747	117	95.995
Tahun 1993	83.021	4.241	5.134	3.893	-	96.289
Tahun 1992	83.606	4.197	4.850	4.305	75	97.033
Tahun 1991	83.225	4.318	5.374	3.610	-	97.723
Tahun 1990	72.752	5.198	5.387	4.670	-	98.007
Tahun 1989	83.139	5.287	5.502	5.578	-	99.506

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Karawang

Untuk meningkatkan pelayanan pos dan giro hingga menjangkau sampai ke tingkat pedesaan, maka di sekitar wilayah kabupaten ini telah dibangun berbagai tipe kantor pos dan giro. Kantor Pos dan Giro kelas I 1 buah, Kantor Pos dan Giro Tambahan tiga buah, Kantor Pos dan Giro Pembantu empat belas buah, Pos Keliling Kota tiga buah, Pos Keliling desa delapan belas buah, Bis Surat 142 buah, Depot benda Pos 37 buah, Kotak Pos 210 buah, dan Paket Pelayanan 37 buah.

Di samping itu untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan untuk menunjang pembangunan daerah, maka di Kabupaten Karawang telah terpasang jaringan telepon otomatis, dengan menggunakan jaringan bawah tanah. Sampai dengan tahun 1995 yang lalu di Kabupaten ini telah dipasang prasarana telekomunikasi sebagai berikut :

-	Telepon	9.005	sst
-	Telepon umu akrtu	70	sst
-	Telepon umum koin	126	sst
-	Telex	15	buah
-	Faksimili	78	buah
-	Wartel	7	buah

2. Daerah Studi Kasus : Kecamatan Klari

Daerah sampel bagi penelitian di Kabupaten Karawang ini adalah Kecamatan Klari, di mana pengamatan dapat di konsentrasikan secara mendalam kepada berbagai masalah yang dihadapi oleh daerah dan masyarakatnya. Kecamatan Klari adalah salah satu kecamatan yang dapat dianggap mewakili wajah Karawang secara umum. Antara lain karena di daerah ini terdapat potensi sumber daya alam seperti dimiliki oleh kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Karawang.

Kecamatan Klari dengan luas 8.961 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 103.486 jiwa (tahun 1995) ini terletak di Kabupaten Karawang bagian selatan. Desa-desanya adalah :

Anggadita, Gintungkerta, Sumurkondang, Pancawati, Duren, Walahar, Belendung, Curug, Kiarapayung dan Cimahi. Walaupun terletak lebih ke selatan, namun masih tergolong kecamatan yang "terbuka", karena mendapat pengaruh langsung dari kelancaran akses transportasi umum. Di kecamatan ini terbentang ruas jalan raya negara, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan tol Jakarta-Cikampek, dan jalur kereta-api Pantura.

Kecamatan Klari sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Telagasari dan Karawang, di sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Telukjambe, disebelah timur dibatasi oleh Kecamatan Cikampek, sedangkan di sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur.

Sesuai dengan keadaan topografi daerahnya sebagian besar wilayah Kecamatan Klari terbentuk oleh tanah yang bergelombang, dengan kemiringan 3° - 15° , terutama di bagian selatan yang dipotong oleh jalan tol Jakarta-Cikampek. Jadi bagian selatan Kecamatan ini berupa tanah berbukit-bukit, seperti di wilayah desa Walahar, Curug.

Curah hujan di Kecamatan Klari termasuk ke dalam wilayah pertengahan, dengan rata-rata curah hujan tahunan sekitar 2000 - 2500 mm pertahun. Curah hujan ini sebenarnya cukup baik untuk mendukung pertanian, tapi keadaan tanahnya yang berbukit-bukit dan sebagian besar terbentuk oleh tanah jenis kompleks podsolik daerah kekuningan yang longgar menyebabkan air tanah meresap cepat jauh dari jangkauan akar tanaman padi-padian. Akibatnya sebagian lahan persawahan di kecamatan ini terpaksa ditanami sekali setahun, pada musim hujan saja. Hanya persawahan yang lebih ke utara, sekitar desa Duren, Belendung, dan Telagasari yang dapat ditanami dua kali setahun, berkat adanya saluran irigasi yang meningkatkan kelas sawah menjadi sawah teknis yang produktif (sepanjang tahun).

Kecamatan Klari juga memiliki peran sebagai daerah penghasil beras, terbukti dari adanya lahan pertanian sawah irigasi (sawah teknis) seluas 3.546 Ha dan sawah non-irigasi (sawah non-teknis) seluas 457 Ha. Peran tersebut terutama nampak di desa-desa bagian utara. Sebaliknya desa-desa yang terletak di bagian selatan kondisi alamnya yang sebagian besar lebih tinggi dari jangkauan aliran sungai Citarum, maka dapat dimaklumi mengapa "tanah darat " yaitu tanah yang bukan untuk persawahan di kecamatan ini lebih luas dari pada tanah persawahan, yaitu 4.958 Ha. Belum termasuk tanah darat yang telah dikembangkan menjadi lahan kegiatan perindustrian seluas 758 ha (menurut data tahun 1993).

Perubahan mendasar bagi pembangunan yang dialami Kecamatan Klari Sejak terjadi paling tidak sejak tujuh tahun yang lalu, yaitu ketika sebagian tanah yang tidak produktif di bagian selatan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek. Setelah pembangunan jalan tol tersebut rampung Kecamatan Klari praktis terbuka untuk berbagai kegiatan pembangunan, terutama dalam menunjang kegiatan industrialisasi. Wilayah kecamatan Klari yang sejak tahun 1970-an memang sudah memiliki berbagai pabrik kecil dan sekarang semakin berkembang menjadi wilayah industri dan zona industri, beserta dengan segala prasarana pendukungnya, seperti perumahan karyawan, pasar dan tempat hiburan.

Contoh yang menarik adalah desa Walahar, walaupun di desa ini terdapat bangunan bendungan Walahar yang mengalirkan air ke saluran irigasi ke berbagai desa di Kabupaten Karawang bagian utara, akan tetapi desa Walahar ini sendiri boleh dikatakan tidak mungkin memanfaatkan bendungan tersebut untuk mengairi tanah pertaniannya. Hal ini disebabkan tanah kering di desa ini umumnya berada pada ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh aliran air sungai Walahar. Sehingga tanahnya hampir semua tandus dan hanya dimanfaatkan untuk lahan tegal (tanah kering yang ditanami palawija yang tidak memerlukan genangan air). Kondisi ini

pula yang menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengizinkan pembangunan pabrik-pabrik di desa Walahar. Desa seluas 209 Ha ini hampir separohnya sudah dijual kepada pengusaha untuk dijadikan lahan industri. Dikabarkan hasil penjualannya tanah tandus tersebut oleh bekas pemiliknya dibelikan sawah teknis di desa lain yang mendapat pengairan irigasi.

Semangat untuk mengubah wajah desa dari daerah pertanian tidak produktif menjadi daerah industri modern juga nampak di desa-desa lain, terutama yang dekat dengan jalur transportasi darat. Contoh yang paling menonjol adalah desa Kiarapayung, desa yang terletak di sisi selatan jalan tol Jakarta-Cikampek dan memiliki akses langsung ke Pintu gerbang tol Karawang Timur ini sudah seluruhnya dibeli oleh PT Texmaco, sebuah perusahaan PMA yang bergerak di bidang tekstil. Penduduk aslinya sebagian besar pindah ke desa-desa lain, dan sebaliknya kedudukan mereka digantikan oleh para pendatang dari ditanami berbagai sukubangsa yang bekerja sebagai karyawan dan buruh di pabrik-pabrik tekstil.

Menurut sejumlah informan perubahan - perubahan yang terjadi di desa-desa yang ada di Kecamatan Klari tersebut tidak menimbulkan masalah sosial yang berat. Karena penduduk yang semula hidup sebagai petani pemilik lahan karing atau sebagai buruh tani musiman, sekarang pindah dan membeli tanah yang lebih produktif di desa-desa tetangganya. Hal ini juga dapat dimaklumi dari sudut sosial-budaya, bahwa kehidupan masyarakat di daerah ini tidak terkungkung oleh batasan administratif yang ada. Sejak dulu mereka sudah memiliki hubungan kekerabatan, lewat aliansi perkawinan dengan warga desa lain. Dapat dimaklumi, betapa sumber daya manusia di daerah ini sekarang banyak diambil alih oleh pendatang. Tidak heran jika separoh dari pamong desa di Desa Walahar, Duren, Kiarapayung dan Curug adalah pendatang dari daerah lain.

Sementara itu, sebagai salah satu kecamatan yang memiliki posisi strategis di jalur yang tergolong dekat dengan Jakarta, maka Klari juga telah mengalami secara langsung berbagai dampak pembangunan ibukota dan perkembangan kehidupan masyarakat urban. Desa-desanya banyak didatangi oleh orang dari Jakarta, sebagian di antaranya membeli tanah dan membangun rumah di sana. Penduduk urban ini memiliki pola hidup modern yang menggantungkan matapencarian ke kota metropolitan. Mereka jarang bergaul akrab dengan penduduk setempat, sebaliknya membatasi diri dalam interaksi eksklusif. Selain pabrik-pabrik, di Kecamatan ini berdiri pula sejumlah perumahan, mulai dari kelas sederhana, sampai perumahan mewah, dan perumahan-perumahan kebun yang diiklankan dengan gencar kepada penduduk Jakarta.

B. KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang menurut catatan kantor Statistik Kabupaten Karawang tahun 1989 sebanyak 1.386.952 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1990 tercatat sebanyak 1.491.914 jiwa, dengan angka LPP 1,89%. Kemudian pada tahun 1991 berkurang menjadi 1.478.378 jiwa. Pada tahun 1992 naik lagi menjadi 1.482.357 jiwa. Sedangkan pada tahun 1993 tercatat sebanyak 1.551.016 jiwa, lalu pada tahun 1994 tercatat sebanyak 1.568.212 jiwa, dan tahun 1995 menjadi 1.584.715 jiwa dengan LPP 1,05%, dan kepadatan penduduk rata-rata 894 jiwa/km².

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Karawang sebanyak 2,676 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Cikampek sebanyak 1.612 jiwa/km², dan Kecamatan Rengasdengklok sebanyak 1.547 jiwa/km². Sedangkan kepadatan pendudukan di Kecamatan Klari pada tahun 1995 yang lalu tercatat sebanyak 1.151 jiwa/km² (dengan penduduk sebanyak 103.486 Jiwa di tanah seluas 8.961 ha atau 89,61 Km²).

TABEL 3.
 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEPADATAN,
 DAN PENYEBARANNYA MENURUT KECAMATAN, DI
 KARAWANG, TAHUN 1989-1994

KECAMATAN	Luas Km2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Km2	Penyebaran (%)
Pangkalan	180,71	57.316	317	3,65
Telukjambe	224,12	107.865	481	6,87
Klari	89,01	107.042	1.207	6,85
Cikampek	73,22	118.278	1.615	7,54
Jatisari	130,95	134.691	1.029	8,59
Cilamaya	131,08	125.607	958	8,02
Lemahabang	46,71	54.294	1.162	3,46
Telagasari	46,40	54.875	1.183	3,51
Karawang	70,53	188.787	2.677	12,04
Rawamerta	53,95	45.998	853	2,93
Tempuran	112,43	68.418	609	4,36
Rengasdengklok	122,76	189.992	1.548	12,12
Pedes	102,18	86.687	848	5,53
Batujaya	176,22	111.841	635	7,13
Pakisjaya	64,48	30.107	467	1,92
Cibuaya	89,18	45.057	505	2,87
Tirtamulya	39,34	40.997	1.042	2,61
Jumlah	1.753,27	1.568.212	894	100,00
Tahun 1993	1.753,27	1.551.016	885	100,00
Tahun 1992	1.753,27	1.482.357	845	100,00
Tahun 1991	1.753,27	1.478.378	843	100,00
Tahun 1990	1.753,27	1.491.914	851	100,00
Tahun 1989	1.753,27	1.392.317	794	100,00
Tahun 1995	1.753,27	1.584.715	899	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Karawang

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten ini pada tahun 1980 -1990 sebesar 1,89%. Sedangkan antara tahun 1990 - 1994 tercatat sebesar 1,11%. Artinya dalam jangka waktu tidak lebih dari lima tahun angka pertumbuhan penduduk Karawang telah meningkat sampai dengan 1,11% pertahu. Menurut pola usia penduduk Karawang masih berada pada kelompok menengah (intermediate), seperti terlihat dari persentase umur 0 - 14 tahun sebesar 43,92%, kelompok umur 15 - 64 tahun sebesar 61,53%, dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 3,55%. Dengan kata lain sumber daya manusia, khususnya penduduk dalam usia kerja produktif secara kuantitatif cukup besar, yaitu lebih dari separoh penduduk.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang selain dari besarnya pertumbuhan secara alami (kelahiran), juga diperbesar oleh angka pertambahan penduduk pendatang (migrasi). Masalah migrasi di Karawang memang cukup laju, tapi juga sulit dikendalikan dan didata, karena pertambahan pabrik dan kegiatan industri yang semakin meningkat di wilayah itu. Karena itu usaha untuk menekan laju pertambahan penduduk lebih dititik beratkan kepada upaya penekanan tingkat kelahiran melalui program Keluarga Berencana.

Dari agama yang dianut, penduduk Kabupaten Karawang tercatat mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 98,64% beragama Islam, 0,17% beragama Katholik, 0,61% beragama Protestan, 0,17% beragama Budha, dan 0,01 beragama Hindu. Kehidupan keagamaan di Kabupaten ini ditandai pula oleh keragaman tempat ibadat yang dibangun, baik oleh masyarakat, maupun oleh bantuan Pemda. Pada tahun 1993 di Kabupaten Karawang tercatat sebanyak 1.148 buah mesjid, 2,985 buah langgar, 301 buah musholla, 20 buah gereja, 1 buah kelenteng, dan 5 buah wihara.

Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di sekolah-sekolah terlihat dari angka murid-murid SD yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP pada tahun 1990

hanya 75%, maka pada tahun 1993 telah mencapai angka 88,10%. Secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakatnya relatif masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari data pencari kerja pada tahun 1993, yaitu: 505 orang sarjana, 329 sarjana muda, 7.998 SLTA, 3.421 SLTP, dan 6.273 SD.

C. SOSIAL - EKONOMI

1. Sejarah

Pada abad ke-17 kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Kesultanan Mataram, dengan rajanya yang terkenal Sultan Agung Haryokusumo. Sultan Agung terkenal sebagai seorang raja Jawa yang sangat menentang dominasi kekuasaan kongsi dagang VOC/Belanda yang cenderung untuk menjajah negeri yang kaya dengan hasil alam ini. Sebaliknya Sultan Agung juga berkeinginan menyatukan seluruh Nusantara dibawah kekuasaannya, paling tidak menyamai kekuasaan raja-raja dari kerajaan Majapahit sebelumnya.

Sementara itu VOC/Belanda telah berhasil menanamkan kekuasaan dengan menjalankan sistem kolonialisasinya dari kota pelabuhan Jayakarta yang kemudian mereka rubah namanya menjadi bandar Batavia. VOC/Belanda nampaknya juga memahami betapa strategisnya posisi Batavia bagi pengontrolan jalan perdagangan laut yang memang sangat penting artinya pada zaman itu. Batavia terletak di tengah-tengah Kepulauan Nusantara, dan menghubungkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dari Batavia, kongsi dagang Belanda ini bisa mengawasi monopoli perdagangan yang mereka paksakan keseluruhan bangsa asli di Nusantara.

Sayangnya usaha Sultan Agung untuk menghalangi pertumbuhan kekuasaan VOC/Belanda di Batavia tidak mendapat dukungan dari Kesultanan Banten yang juga pernah menguasai bandar itu. Rupa-rupanya para raja di masa itu belum memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang sama untuk

menghadapi musuh dari luar. Masing-masing berjuang sendiri-sendiri dengan strategi dan tujuan yang sulit dipersatukan, bahkan ada diantaranya yang lebih suka memihak VOC/Belanda yang dianggap lebih kuat. Sementara itu kekuatan militer Mataram yang terpusat di Surabaya pada masa itu terlalu jauh untuk segera mencegah penetrasi kekuasaan asing di utara Jawa Barat.

Sultan Agung sangat menyadari, betapa usahanya menyerang Batavia akan sangat tergantung kepada kekuatannya sendiri, sedangkan musuh yang akan ditaklukkan memiliki persenjataan yang kuat dan didukung oleh dana yang tidak terbatas. Selain itu usaha Sultan Agung untuk menaklukkan Batavia juga sering dihalangi oleh laskar Banten yang merasa kuatir pula akan perkembangan kekuasaan Mataram. Oleh karena itu Sultan Agung lalu merancang strategi peperangan jangka panjang yang amat brilian, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan alam sekitar Batavia. Diantaranya adalah mengubah lingkungan alam daerah Karawang yang dimasa itu masih berupa tanah kosong berbelukar dan berawa-rawa menjadi lahan basis pertahanan dan daerah persawahan untuk mendukung kebutuhan perbekalan prajuritnya.

Mula-Mula Sultan Agung memerintahkan Adipati (Panglima) Rangga Gede untuk mengambil alih daerah Karawang yang dibayang-bayangi oleh kekuasaan Banten. Rangga Gede selain membawa serta prajurit-prajuritnya juga memboyong keluarga-keluarga petani dari Jawa Timur, antara lain lewat **Bedol deso** (memindahkan penduduk satu desa). Para prajurit dilatih menyesuaikan diri dan melakukan penyerangan di daerah berawa-rawa di sekitar karawang, sesuai dengan kondisi alam bandar Batavia yang terletak hanya sekitar 75 kilometer dari daerah itu. Sedangkan para petani dikerahkan untuk membuat lahan persawahan dengan memanfaatkan air sungai Citarum dan Cilamaya.

Untuk membangun pemukiman di daerah itu maka para Prajurit dan petani itu juga mengembangkan teknologi pembuatan batu bata. Karena di daerah itu pohon-pohon kayu sangat kurang, maka untuk membakar bata agar menjadi kering, kuat dan merah mereka gunakan kulit gabah (sekam kering). Jadi dapat dibayangkan, bahwa rumah-rumah penduduk Karawang pada abad ke-17 umumnya berdinding bata, berlantai tanah, dan beratap jerami (merang).

Setelah beberapa tahun kondisi pemukiman para pendatang dari Mataram di Karawang tersebut sudah makin mantap. Akhirnya Sultan Agung melantik Singaperbangsa sebagai Bupati Karawang yang pertama pada tanggal 14 September 1633 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Maulud (Zulhijjah) 1043 Hijriah. Tanggal tersebut sekarang ditradisikan sebagai peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang.

Segala persiapan peperangan jangka panjang yang dilakukan Sultan Agung itu nampaknya sudah disadari pula oleh VOC/Belanda. Untuk menghadapinya Belanda segera memperbesar dan memperkuat bentengnya di Batavia. Selain itu Belanda memperkuat jalur transportasi laut dengan memperketat keamanan laut di sekitar Teluk Jakarta dan Laut Jawa. Prajurit Mataram memang berhasil melakukan pengepungan dari darat, sehingga VOC/Belanda sama sekali tidak bisa memperoleh perbekalan sumber daya dari pedalaman. Akan tetapi karena Mataram tidak memiliki armada kapal perang yang mampu menandingi armada militer VOC/Belanda maka usaha menekan dan mempersempit ruang gerak musuh menjadi sia-sia, karena VOC/Belanda tetap bebas memperoleh perbekalan lewat laut.

Usaha Sultan Agung untuk menaklukkan bandar Batavia gaga karena tidak memiliki armada angkatan laut yang kuat, namun usahanya menjadikan Karawang menjadi basis perjuangan telah mengubah nasib daerah itu dari daerah tidak produktif menjadi salah satu daerah lumbung padi di Pulau Jawa. Ironisnya,

setelah Sultan Agung wafat tidak ada keturunannya yang mampu melanjutkan kegigihannya menentang kekausaan VOC/Belanda. Sehingga daerah Karawang akhirnya jatuh ke tangan Belanda yang dengan kecerdikannya benar-benar menjadikan Karawang sebagai daerah pertanian sawah terluas di Jawa Barat.

Pada masa pemerintahan Hindai-Belanda potensi daerah Karawang sebagai penghasil beras mendapat perhatian besar. Belanda mendatangkan ahli-ahli pertanian dan pengairannya untuk mempelajari potensi daerah ini. Salah satu sumber daya alam yang paling mendapat perhatian dalam rangka pengembangan sistem pertanian irigasi di Karawang adalah debit air Sungai Citarum yang sangat memuaskan di masa itu. Belum termasuk air Sungai Cilamaya dan anak-anak sungai dari Citarum. Salah satu usaha untuk meningkatkan potensi daerah persawahan Karawang adalah dengan dibangunnya bendungan Walahar pada tahun 1911, yang kemudian dapat berfungsi penuh sejak tahun 1925.

Besarnya peranan Sungai Citarum bagi kehidupan masyarakat di sekitar daerah alirannya juga terbukti pada zaman Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4 Masehi. Pada masa itu Tarumanegara yang terpusat di hulu Sungai Citarum jauh di pedalaman Jawa Barat memanfaatkan aliran Sungai Citarum yang cukup lebar dan dalam di masa itu sebagai sarana perhubungan dengan dunia luar. Pada masa sekarang fungsi transportasi Sungai Citarum sudah amat berkurang karena kemajuan sistem transportasi darat yang luar biasa, sebaliknya lebih banyak berfungsi sebagai pendukung sektor pertanian, penghasil energi listrik, pendukung kegiatan industri, penghasil air minum, sebagai sarana pariwisata, dan lain-lain.

Posisi daerah Karawang yang sangat strategis untuk menantang penjajah yang berkedudukan di Batavia, kembali menjadi andalan bagi para pejuang pada masa perjuangan fisik. Karawang tercatat pula dalam sejarah kemerdekaan Indonesia

sebagai salah satu daerah pertempuran melawan agresor Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia yang telah memerdekakan diri. Di daerah inilah Bung Hatta dan Bung Karno dibawa oleh para pemuda untuk mempersiapkan upacara kemerdekaan dan menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan. tepatnya dilakukan di salah satu rumah di kampung Bojong, Kecamatan Rengasdengklok.

Tidak lama setelah kemerdekaan, di daerah ini pernah terjadi pertempuran besar-besaran antara Belanda dengan para pejuang. Pertempuran besar tersebut sempat dilukiskan oleh penyair Chairil Anwar dalam puisinya "Karawang Bekasi", tidak heran jika kerawang selain dijuluki lumbung padi juga dikenal sebagai daerah basis perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui dunia, maka di daerah ini didirikan tugu kebulatan tekad proklamasi kemerdekaan.

2. Latar Belakang Kebudayaan

Dilihat dari letaknya dapat diperkirakan, bahwa Kabupaten Karawang pada masa dulu termasuk daerah persinggahan dan percampuran berbagai suku bangsa, terutama di daerah pantai dan muara sungai yang menghubungkan penduduk pedalaman Jawa bagian barat dengan dunia luar. Menurut Budhisantoso (1977), di daerah pesisir Karawang ada tiga golongan penduduk yang menggunakan bahasa sehari-hari yang berbeda. Seperti di Kecamatan Cibuaya ada penduduk yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia (Melayu).

Pada masa sekarang mayoritas penduduk Kabupaten Karawang sebenarnya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Sebaliknya di bagian pesisir, seperti di Desa Cibuaya malah bahasa Jawa yang menjadi bahasa lokal, dalam arti digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh mayoritas penduduknya. Hal ini nampaknya merupakan salah satu pengaruh dari migrasi orang Jawa pada masa Sultan Agung dari Mataram. Selain itu juga disebabkan karena adanya arus buruh pendatang

dari daerah Cirebon, Indramayu, Brebes dan Tegal di Jawa Tengah ke daerah pantai utara Karawang ini. Kecuali itu di daerah pesisir juga berdiam orang Cina, Bugis, Madura dan Banten yang masing-masing memiliki lapangan usaha yang berbeda. Orang Cina yang tidak kecil jumlahnya itu memang tidak lagi menggunakan bahasa leluhurnya, namun mereka dengan jelas nampak membedakan diri dari penduduk lain, serta mempunyai pengaruh ekonomi yang cukup kuat. Dominannya bahasa Jawa di bagian pesisir juga disertai pengaruh kebudayaannya, antara lain terlihat pada unsur kebudayaan berupa sistem kekerabatan, kepercayaan kejawen, kesenian wayang kulit dan berbagai tradisi kejawen lainnya (Budhisantoso, 1977:85).

Hal tersebut di atas berbeda dengan daerah pedalaman, di kecamatan-kecamatan yang terletak di bagian selatan sebaliknya bahasa Sunda lebih banyak digunakan oleh penduduknya, seiring dengan besarnya pengaruh masyarakat Sunda pinggiran. Hal ini ditandai pula oleh unsur kebudayaan Sunda seperti dalam kehidupan kekerabatan, tatakrama, kepercayaan, kesenian dan tradisi-tradisi lain. Di Kecamatan Klari misalnya, tradisi Sunda terasa demikian hidup, terutama nampak dalam bahasa percakapan sehari-hari penduduk aslinya, dan dalam kesenian yang khas (seperti jaipongan, topeng karawang, adong-adong, kecapi sunda, wayang golek).

Bahasa Indonesia yang digunakan dalam percakapan sehari-hari biasanya ada pada kesempatan-kesempatan resmi, dan dalam situasi berkomunikasi dengan pendatang yang tidak bisa berbahasa setempat. Sedangkan bahasa Melayu digunakan sebagian masyarakat di Karawang seperti dimaksud Profesor Budhisantoso dalam disertasinya adalah penduduk yang berasal dari daerah Bekasi. Secara etnografis kebanyakan penduduk Bekasi adalah bagian dari suku bangsa Betawi, yaitu suku bangsa yang terbentuk sejak Jakarta bernama Betawi (Batavia) menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Penduduk yang berbahasa Melayu

(Betawi) di daerah Karawang ini selain hidup sebagai nelayan perairan muara sungai, sebagai penangkap burung di rawa-rawa, juga ada yang menjadi petani pemilik sawah. Sejak tahun enam puluhan memang ada sebagian orang Betawi kaya di daerah Bekasi dan Pasar Rebo yang membeli sawah di daerah Karawang, seperti dikisahkan oleh sejumlah tokoh tua Betawi di Pasar Rebo.

Pada masa sekarang daerah pantai utara Karawang, yang dulu didominasi oleh masyarakat berbahasa Jawa, telah semakin banyak dimasuki oleh pendatang yang berbahasa Sunda. Hal ini didukung oleh status Kabupaten Karawang yang menjadi bagian dari Propinsi Jawa Barat yang didominasi oleh suku bangsa Sunda; pengaruh dari para pemimpin formal berbahasa Sunda yang didatangkan dari ibukota propinsi dan kabupaten; dan akibat desakan keluar dari penduduk berbahasa Sunda dari wilayah selatan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, termasuk ke daerah pantai utara Kabupaten Karawang. Nampaknya peningkatan jumlah penduduk yang berbahasa Sunda di Karawang bagian utara dimulai sejak pembangunan irigasi dan berbagai sarana pertanian di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, khususnya di daerah kabupaten Karawang. Peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi daya tarik bagi pendatang dari daerah-daerah miskin di pedalaman untuk mendatangi persawahan di pantai utara. Para pendatang itu mula-mula hidup sebagai buruh musiman. Kemudian ada yang menetap dan beralih ke pekerjaan lain, seperti pembuat batu bata di **lio** (tempat pembakaran bata), penggali pasir, pedagang keliling, dan sebagainya.

Di daerah Cibuaya misalnya, wayang golek baru dikenal penduduknya pada tahun 1928, dan kemudian pada zaman pendudukan Jepang telah dapat menggantikan kedudukan wayang kulit. Jawa (Budhisantoso (1977 : 88). Masuknya Jepang di daerah ini juga menghambat kedatangan buruh-buruh musiman dari Jawa, sebaliknya mendorong meningkatnya arus kedatangan buruh tani dan pencari kerja dari desa-desa Sunda yang miskin di selatan.

Baik masyarakat Sunda maupun Jawa di daerah ini mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan bentuk kekerabatan yang matriloal. Karena pasangan-pasangan yang baru kawin lebih suka bergabung tempat tinggal di lingkungan keluarga asal pihak perempuan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari di rumah tangga penghormatan terhadap orang tua dan bertahannya tradisi upacara menghormati roh nenek moyang pendiri desa (cikal bakal) dan kekuatan kesuburan tanah.

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Karawang umumnya Islam, kecuali golongan Cina yang telah berdiam di tengah-tengah mereka sejak lama yang tetap dengan keyakinan Kong Hu-tsu. Selain itu perkembangan sebagian daerah di wilayah kabupaten ini menjadi daerah industri dan munculnya pasar-pasar yang terbuka untuk umum menyebabkan ada sebagian penduduk pendatang baru yang beragama Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha.

Sebagai daerah "lumbung" padi potensi ekonomi Kabupaten Karawang dari sektor ekonomi memang cukup baik, namun potensi tersebut tidak merata di seluruh wilayah. Daerah bagian selatan kabupaten ini berbentuk tanah berbukit-bukit yang gersang dan sulit sekali dijangkau oleh sistem pengairan teknis bendungan. Akibatnya penduduk di bagian selatan ini tidak dapat mengandalkan matapencaharian dari pengolahan lahan sawah tadah hujan setempat. Jika di bagian utara penduduk memanfaatkan hampir semua lahan yang mungkin ditanami menjadi sawah irigasi teknis, dan memanfaatkan lahan berawarawa sepanjang pantai menjadi tambak ikan dan udang, maka di daerah selatan hanya sebagian kecil lahannya yang bisa dijadikan sawah.

Menurut sensus tahu 1995, 90% dari penduduk Karawang masih mengandalkan pertanian sebagai matapencaharian. Namun hanya sekitar 23% yang menjadi petani pemilik sawah, sedangkan sisanya merupakan petani penggarap sawah bukan milik, dan petani buruh musiman.

D. SUMBER DAYA ALAM DAN POLA PEMANFAATAN

Bagi kebanyakan masyarakat petani di Kabupaten Karawang yang disebut sumber daya alam adalah segala bentuk yang menjadi bagian atau bersumber dari tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan ekonomi. Pendapat mereka sangat berkenaan dengan kenyataan bahwa kehidupan ekonomis mereka memang sangat tergantung kepada lahan pertanian, baik milik sendiri, maupun milik orang lain di mana mereka menjadi pemaroh atau pemburuh. Luasnya lahan persawahan dan banyaknya penduduk yang hidup sebagai petani (hampir 90% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Karawang) pendukung pernyataan ini. Karena itu tidak heran jika tanah dianggap sebagai sumber daya alam paling utama di Kabupaten Karawang.

Dalam kenyataannya fungsi tanah pertanian sebagai sumber daya alam yang memberi manfaat bagi manusia, ditopang pula oleh fungsi-fungsi sumber daya alam lain, dalam hal ini yang paling dekat adalah air. Potensi lahan persawahan yang luas di kabupaten ini hanya mungkin lestari jika sumber daya air tetap pula ada secara berkesinambungan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka air dapat dianggap sebagai sumber daya alam kedua yang mendukung kehidupan masyarakat setempat.

Pada zaman dulu mereka sangat tergantung kepada air yang jatuh dari langit setiap musim hujan, akibatnya sawah-sawah mereka hanya mungkin ditanami sekali dalam setahun. Akhirnya sebagian besar sawah di Karawang bisa ditanami dua kali setahun setelah sistem irigasi mekanis dengan dibangunnya bendungan Walahar di Sungai Citarum pada tahun 1911 (dipakai 1924). Pemberdayaan sumber daya alam bagi pertanian tanaman pangan ini semakin mencapai bentuk yang produktif setelah digunakan bibit padi jenis unggul. Sehingga Karawang berhasil mencapai tingkat surplus dan menyangga kebutuhan pangan daerah lain di sekitarnya.

Permukaan tanah sebagai sumber daya alam tidak hanya menyumbang bagi kegiatan pertanian padi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan bangunan, yaitu batu bata. Sejarah pengolahan tanah liat di daerah Karawang menjadi batu bata mungkin sama panjangnya dengan sejarah pembukaan daerah tersebut menjadi daerah persawahan. Beberapa situs arkeologis di daerah Cibuaya misalnya, membuktikan bahwa di tengah persawahan bukan hanya ditanami padi, tapi juga didirikan **lio bata**, yaitu tempat pembuatan dan pembakaran batu bata. Pada masa sekarang paling tidak terdapat sekitar 200 buah **lio bata** yang terdapat di setiap kecamatan. Banyaknya jumlah **lio bata** yang terdapat di setiap kecamatan menunjukkan bagaimana potensi tanah liat yang ada disana. Pada tahun 1993, ada kecamatan yang mempunyai dua belas buah **lio**, seperti di Kecamatan Klari; Namun ada pula yang sama sekali tidak punya, seperti di Kecamatan Telaga sari.

Secara kuantitas potensi tanah liat untuk dibuat bata ini tampaknya semakin menurun, terbukti dari semakin banyaknya perusahaan pembuat bata yang gulung-tikar, alias menghentikan kegiatan produksi. Perusahaan yang gulung-tikar ini umumnya pabrik bata mekanis yang memang memproduksi besar-besaran sesuai dengan modal yang mereka gunakan. Penurunan kuantitas ini nampaknya dipengaruhi pula oleh penurunan kualitas. Karena tanah liat yang dipakai mutunya sudah berkurang, minat pembeli juga berkurang. Perusahaan bata yang masih bertahan seperti di desa Belendung, Kecamatan Klari, semuanya adalah **lio bata**, yaitu pembuatan bata secara tradisional: menggunakan tenaga manusia, tenaga kerja terbatas pada anggota keluarga, dan proses pembakaran bata dilakukan dengan menggunakan kulit gabah (sekam). Didesa Belendung semula terdapat dua belas buah pabrik bata tradisional, dan tiga buah pabrik bata mekanis. Tapi sekarang hanya tinggal dua belas pabrik bata tradisional.

Batu bata yang berasal dari desa Belendung ini semuanya memakai cap 777. Hasil produksinya kebanyakan dibeli oleh perusahaan-perusahaan bangunan yang akan menjual lagi

kepada para pembeli secara eceran. Sebagian dibawa ke Jakarta dengan truk-truk tiga-perempat (light truck, ukuran sedang) untuk pembangunan perumahan dan gedung-gedung. Bagi sebagian penduduk yang sudah lama berdiam di Jakarta, jenis batu bata yang berasal dari Karawang memang cukup dikenal. Tidak jarang penduduk Jakarta yang sedang membangun rumah sendiri datang langsung membeli bata ke Karawang. Pada masa sekarang banyak pula yang langsung dimanfaatkan di daerah setempat, yaitu untuk pembangunan pabrik, serta perumahan mewah dan sederhana.

Sumber daya alam lain yang digunakan untuk pembangunan fisik, rumah, gedung, dan jalan adalah pasir tambang. Dalam hal ini Kecamatan Klari yang kurang didukung oleh lahan pertanian yang subur cukup beruntung dengan adanya kandungan pasir di beberapa desanya. Dari tujuh buah tempat penambangan pasir di Kecamatan Klari, tiga buah diantaranya diusahakan oleh perusahaan swasta, empat tempat lainnya diusahakan oleh penduduk setempat secara tradisional. Penggalian pasir oleh perusahaan swasta seperti di desa Pancawati mencakup lahan sekitar lima Ha. Disini penambangan memanfaatkan peralatan mekanis modern, seperti : pompa penyedot, pompa penyemprot, ban berjalan, traktor, elevator, dan mesin pencuci dan pemisah ukuran. Penggalian tradisional dilakukan penduduk dengan menggunakan cangkul, sekop, dan pengki.

Pasir tersebut selain dibawa ke Jakarta melalui jalan propinsi, jalan tol dan kereta barang, juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung, pabrik, perumahan dan jalan di daerah setempat. Kegiatan penggalian pasir itu sendiri meninggalkan bekas berupa lobang-lobang besar. Dari kegiatan penambangan pasir oleh pihak swasta selama tiga tahun di desa Pancawati misalnya telah terbentuk sebuah danau seluas dua Ha sebagai akibat dari pengelupasan tanah di kulit bumi seluas tiga Ha. Menurut informasi, area tambang tersebut bisa saja diperluas lagi dengan membuat kontrak baru dengan Pemerintah Daerah. Akan tetapi hal itu tidak boleh dilakukan jika harus membabaskan tanah produkti (sawah atau kebun).

TABEL 4.
JENIS USAHA BAHAN GALIAN DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 1993

Kecamatan	Batu Koral	Pasir	Kapur	Kaolin	Pasir Kuarsa	Tanah Liat/bata
Pangkalan	5	1	1	-	-	1
Telukjambe	-	4	-	-	1	5
Klari	-	7	-	-	-	12
Cikampek	-	1	-	-	-	5
Jatisari	-	3	-	-	1	3
Cilamaya	-	3	-	-	-	11
Lemahabang	-	-	-	2	-	7
Telagasari	-	1	-	-	-	-
Karawang	-	-	-	-	-	2
Rawamerta	1	2	-	7	-	3
Tempuran	-	2	-	-	-	5
Rengasdengklok	-	7	-	-	-	2
Pedes	-	-	-	-	-	-
Batujaya	-	4	-	-	6	2
Pakisjaya	-	2	-	-	-	3
Cibuaya	-	-	-	-	1	6
Tirtamulya	-	1	-	-	-	3
Jumlah	6	38	1	9	9	200

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Karawang

Sumber daya alam lain berupa bahan tambang yang terkandung di dalam tanah Kabupaten Karawang adalah batu koral atau batu kali, kapur, kaolin dan pasir kuarsa. Batu koral paling banyak digali orang di Kecamatan Pangkalan, sebuah kecamatan yang terletak di bagian selatan dengan kondisi alamnya yang berkukit-bukit dan termasuk kurang produktif untuk pertanian. Penambangan kaolin terdapat di Kecamatan Rawamerta sebanyak tujuh buah usaha penambangan, dan di Kecamatan Lemahabang sebanyak dua buah usaha tambang.

Sedangkan pasir kuarsa digali di Kecamatan Batujaya sebanyak enam usaha penambangan, di Telukjambe satu buah usaha penambangan, di Jatisari satu buah usaha penambangandan Tirtamulya satu buah usaha penambangan. Batu koral selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan setempat, sebagian juga diangkut ke Jakarta dan Bekasi. Kapur yang ditambang dari daerah perbukitan di Kecamatan pangkalan hanya diusahakan oleh satu unit usaha. Kaolin dijual kepada para pengusaha pabrik keramik di Jakarta dan di sekitar Karawang sendiri.

E. PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pemanfaatan tanah, ruang, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1970-an, khususnya sejak pembangunan terencana lewat program Pelita Pertama dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia. Daerah Karawang yang mempunyai potensi dikembangkan menjadi daerah industri, didukung oleh keleluasaan dan kemudahan prasarana pokok, seperti tersedianya lahan yang layak secara teknis dan memenuhi syarat formal untuk memperoleh izin, adanya sumberdaya energi seperti tenaga listrik dan bahan bakar untuk motor penggerak, adanya prasarana transportasi, seperti jalan raya yang dapat dilalui oleh kendaraan berat, adanya jalan kereta api, dan adanya sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang dapat direkrut untuk menjadi bagian dari sistem produksi pabrik.

Dukungan lingkungan tersebut memang tidak langsung terbentuk menjadi potensi yang langsung jadi, tapi berkembang secara bertahap, sesuai dengan perkembangan gerak pembangunan nasional sendiri. Misalnya, syarat tersedianya lahan yang layak secara teknis dan mendapat izin resmi dari pemerintah daerah setempat tidaklah terjadi dengan mudah. Di daerah Kabupaten Karawang bagian selatan memang banyak tanah rakyat yang tidak produktif bahkan terhitung sebagai lahan kritis untuk dijadikan lahan pertanian, padahal masyarakatnya sendiri kebanyakan hanya

memiliki keterampilan dalam bertani, baik sebagai petani penggarap, maupun sebagai buruh tani. Tanah yang sebagian "menganggur" tersebut pada mulanya mudah sekali "dibebaskan", dalam dari dibeli, oleh pengusaha. Akan tetapi setelah pemerintah daerah memiliki perencanaan tata guna tanah dan setelah adanya sejumlah undang-undang dan peraturan pertanahan, maka pembebasan tersebut tidak lagi dapat dilakukan seenaknya.

Syarat utama yang sering dikemukakan oleh aparat pemerintah adalah penggantian lahan bagi usaha pertanian yang produktif. Artinya sungguhpun ada lahan pertanian tanah kering atau sawah tadah hujan yang dijual oleh petaninya, harus ada lahan pertanian lain yang lebih produktif sebagai gantinya. Dengan cara itu diharapkan peranan Karawang sebagai lumbung beras tetap bisa dipertahankan. Pamong desa di Desa Walahar, Curug, dan Belendung yang diminta pendapatnya juga mengemukakan, bahwa lahan pertanian di daerah mereka memang berkurang, tapi toh petani yang telah menjual lahannya itu dapat membeli lahan pertanian di desa lain. Argumentasi mereka sebenarnya terasa sangat instruktif, karena seragam dan sulit dibuktikan di lapangan. Siapa yang dapat menjamin bahwa petani yang menjual lahannya yang tidak produktif benar membeli lahan yang lebih produktif di desa lain?

Cara itu tetap saja mengurangi total luas lahan di Kabupaten Karawang. Dengan kata lain pembangunan industri tetap berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian di Karawang. Hal tersebut dibuktikan oleh semakin berkurangnya jumlah lahan sawah dari tahun-ke tahun, seperti terlihat pada Tabel dua mengenai Luas Lahan Sawah Menurut Penggunaan di Tiap Kecamatan, Kabupaten Karawang, antara tahun 1989-1994. Sayangnya data ini tidak didukung oleh data tentang penambahan lahan industri yang seharusnya juga dicatat oleh setiap desa oleh Kantor Statistik setempat.

Tersedianya lahan yang cukup luas dan kemudahan membebaskan tanah rakyat bukanlah jaminan bagi meningkatnya pertumbuhan industri secara cepat. Bagaimanapun kegiatan industri membutuhkan sumber energi untuk menggerakkan sistem mekanis dari kegiatan produksi. Industri modern ditandai oleh sifatnya yang amat boros energi, khususnya energi yang diperoleh dengan memutar motor. Untuk itu hanya ada dua alternatif sumber daya andalan, yaitu tenaga listrik dan tenaga bahan bakar minyak. Bagaimanapun bentuknya, pabrik-pabrik yang berdiri di zona industri dan kawasan industri di Kabupaten Karawang memerlukan kedua sumber energi ini. Aliran listrik tegangan tinggi yang diperoleh setelah adanya waduk Jatiluhur, Walahar dan berbagai waduk lain di Jawa Barat menjadi sumber daya yang amat berarti bagi perkembangan industri di Karawang. Sejak satu windu belakangan ini tenaga listrik untuk mendukung kegiatan industri tersebut telah tersedia lebih dari cukup, sehingga pengusaha yang sudah memiliki lahan dan izin industri tidak ragu lagi mengembangkan usahanya di daerah ini.

Banyak kalangan menilai, perkembangan industri di Kabupaten Karawang semakin pesat setelah adanya jalan tol Jakarta-Cikampek, yang melalui bagian selatan daerah itu. Pernyataan ini tidak dapat dipungkiri, mengingat tersedianya prasarana transportasi yang lancar merupakan salah satu syarat bagi pertumbuhan dunia industri modern. Sejak dibukanya akses ke jalan tol lewat pintu gerbang Karawang Timur dan Karawang Barat, maka perhubungan antara Karawang dengan Jakarta, dengan kota pelabuhan, dengan zona industri dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Selain itu pemerintah daerah juga telah membangun jalan-jalan propinsi, kabupaten dan kecamatan yang banyak membantu pertumbuhan kegiatan industri.

Sumber daya manusia di Kabupaten Karawang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri tersebut secara kuantitas mudah dipenuhi, karena pertumbuhan penduduk setempat juga semakin mendesak penyediaan lapangan kerja. Akan

tetapi secara kualitas tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat kurang memuaskan para pengusaha, bukan saja karena tingkat pendidikan rata-rata penduduknya memang rendah, juga karena mentalitas masyarakat yang dianggap masih dipengaruhi oleh kebudayaan agraris. Beberapa tokoh pemimpin formal di Kecamatan Klari mengakui bahwa pabrik-pabrik yang ada di kecamatan tersebut lebih suka menerima karyawan yang berasal dari daerah lain, karena pemuda-pemuda setempat dianggap kurang gigih bekerja dan malas meningkatkan keterampilannya. Pabrik-pabrik yang terdapat di Kecamatan Klari banyak yang berusaha di bidang tekstil, untuk itu pengusaha lebih suka menerima kaum wanita muda setempat sebagai pekerja dari pada kaum laki-lakinya yang dianggap tidak teliti dalam bekerja.

Jenis kegiatan industri yang didirikan orang di zona dan kawasan industri Kabupaten Karawang juga cukup beragam. Mulai dari pabrik pengolahan bahan baku untuk memasok kebutuhan industri hilir, sampai pabrik-pabrik pembuatan barang-barang elektronik arus lemah. Di Kecamatan Klari saja misalnya, terdapat pabrik tekstil, perusahaan garmen, perakitan alat elektronik, perlengkapan karoseri kendaraan bermotor, onderdil kendaraan bermotor, pabrik keramik, gelas, fiberglas, dan lain-lain.

BAB III

PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI DAERAH PENELITIAN

A. DAMPAK PENGEKSPLORITASIAN SUMBER DAYA ALAM

Meskipun sebagian besar jenis lahan pertanian di Kecamatan Klari tergolong sebagai lahan non-teknis, karena sangat tergantung kepada curah hujan, namun masih dapat dimanfaatkan untuk tujuan kegiatan ekonomi lain, khususnya sebagai lokasi pengembangan kegiatan industri dan perumahan yang menyangga kebutuhan kota Jakarta. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sudah barang tentu sebagian besar lahan yang ada telah dimanfaatkan sebagai tanah pertanian juga pada awalnya.

Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini, pemanfaatan lahan yang ada berubah fungsinya, karena telah dieksploitasi untuk tujuan industri dengan berbagai bidangnya. Perubahan pengeksploitasi sumber daya alam tersebut bukanya tidak menimbulkan dampak sebagai akibat dari suatu proses perubahan, tetapi paling tidak membawa perubahan pula dalam kehidupan masyarakat setempat yang langsung berhadapan dengan masalah itu.

1. Dampak Ekologis

Lahan-lahan pertanian di Kecamatan Klari yang kurang produktif pada awalnya dimanfaatkan penduduk setempat untuk ditanami singkong, ubi, jagung, pohon buah-buahan dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan semacam itu tidak memerlukan sistem pengairan secara khusus. Biasanya hasilnya dikonsumsi sendiri oleh penduduk yang menanam. Akan tetapi pada akhirnya banyak lahan kurang produktif seperti itu yang ditinggalkan saja oleh pemiliknya, sehingga memberi kesan tidak ada yang memiliki.

Pada masa kini lahan pertanian yang kurang produktif dan yang tidak produktif sama sekali, dari pada dibiarkan, maka oleh sebagian penduduk dijual kepada para pengusaha dari luar daerah. Menurut mereka umumnya uang hasil penjualan tanah itu dibelikan lagi lahan sawah yang lebih subur di kecamatan lain. Menurut keterangan, penduduk Kecamatan Klari biasanya membeli tanah di Kecamatan Duren, seluas dua kali lahan yang dijual. Hal ini bisa terjadi, oleh karena yang membeli tanah mereka adalah pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, sehingga mereka bisa menjual dengan harga tinggi. Sedangkan pada tahun 1989 harga tanah di sana belum begitu mahal.

Sementara itu secara umum, berdasarkan kondisi yang ada, maka potensi sumber daya alam di daerah Kabupaten Karawang pada masa sekarang dapat dikatakan paling tidak didominasi oleh dua sektor dalam kegiatan ekonomi yang terpenting bagi pembangunan Indonesia. Pertama adalah berkenaan dengan fungsi dan peranan dari sumber daya alam yang ada, terutama unsur tanah dan air untuk kepentingan kelancaran kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, dalam hal ini fungsi dan peranan air adalah untuk menopang keberlangsungan fungsi dan peranan lahan persawahan di daerah Karawang yang memang sejak lama telah ditetapkan sebagai "lumbung padi" tersebut. Kedua, adalah fungsi dan peranan sumber daya alam yang ada di Karawang untuk mendukung pengembangan kegiatan di bidang industri modern.

Berkenaan dengan fungsi dan peranan kedua sektor ekonomi tersebut di atas nampaklah bahwa masing-masing memiliki perbedaan yang cukup mencolok secara struktural. Misalnya mengenai kegiatan di bidang ekonomi pertanian yang memproduksi beras yang sebagian besar terdapat di wilayah Kabupaten Karawang bagian utara, sungguhpun telah banyak pula didukung oleh penggunaan sistem teknologi dan ilmu pengetahuan modern, akan tetapi budaya dasar sebagian besar warga masyarakatnya masih berpijak pada kebudayaan agraris tradisional setempat. Tentu saja hal ini dapat dimaklumi mengingat warga masyarakat pendukungnya memang masih mempertahankan upaya-upaya tradisi tertentu dalam pola kehidupan mereka sebagai petani sawah. Sebaliknya warga masyarakatnya yang terlibat di dalam bidang kegiatan industri modern penghasil barang jadi dan jasa yang semakin tumbuh cepat di bagian selatan wilayah Kabupaten Karawang semakin masuk ke dalam sistem kehidupan yang lebih memiliki kinerja tinggi, perencanaan dan pelaksanaan kerja yang lebih efisien, mengikuti suatu pola ketepatan waktu, berpresisi tinggi dan berdisiplin tinggi, serta bersandarkan kepada filsafat kehidupan bisnis modern: berdaya saing tinggi, kemajuan diri diukur lewat peningkatan karir, menyanjung kepuasan materi, dan sebagainya.

Melihat segala kenyataan seperti di atas, maka tim peneliti menganggap perlu memfokuskan kajian terhadap masalah dampak pengeksploitasian sumber daya alam kedua bentuk kegiatan ekonomi yang paling menonjol dan penting kedudukannya di daerah Kabupaten Karawang tersebut. Dalam pendekatan ini baik kegiatan ekonomi pertanian di sawah dalam rangka menghasilkan tanaman bahan pangan, maupun kegiatan ekonomi industri menghasilkan barang komoditi dapat dipandang sebagai unsur-unsur yang sama-sama menimbulkan dampak bagi kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Berkenaan dengan aspek pengelolaan yang dimaksud, maka dalam kajian tentang dampak itu sendiri harus pula dilihat dari sudut kaitannya dengan perilaku manusia yang menjadi bagian dari masing-masing sistem.

Untuk itu penelitian akan mengulas masalah pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Karawang dengan menilik satu persatu latar belakang keberadaan, dan perkembangan masing-masing bidang. Dengan demikian diharapkan akan nampak secara deskriptif, bagaimana sebenarnya pola-pola pengelolaan sumber daya alam di daerah penyangga kota besar, seperti Kabupaten Karawang ini.

(a) *Pertanian Sawah*

Sebelumnya perlu kita lihat hal yang menarik mengenai bentuk pertanian lahan basah, yaitu sawah, berkenaan dengan fungsinya sebagai suatu bentuk ekosistem buatan manusia. Tokoh seperti Geertz amat memuji keadaan struktur ekosistem sawah yang dipandanginya demikian stabil, sehingga dapat menghasilkan hasil panen yang boleh dikatakan tidak berkurang jumlahnya dari satu periode berikutnya, tidak hanya sekali setahun atau dua kali setahun, tetapi sudah dapat terus berkelanjutan selama sistem pengairannya dapat terus berjalan. Tidak heran jika banyak ahli pertanian Barat berpendapat, bahwa padi yang ditanam dengan irigasi adalah tanaman pangan yang paling unik (Lihat Geertz, 1976:30).

Dalam pandangan ahli antropologi seperti Geertz sawah adalah suatu bentuk ekosistem buatan manusia dimana berbagai komponen ekologi saling berhubungan dan membentuk suatu sistem produksi yang kompleks. Kesatuan komponen-komponen ekologi lahan persawahan sesungguhnya merupakan suatu bentuk rangkaian dari sejumlah "organisma hidup dan benda-benda mati yang saling mempengaruhi untuk menghasilkan pertukaran bahan antara bagian-bagian yang hidup dan yang tidak hidup".

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesuburan tanah juga merupakan salah satu komponen benda mati yang menjadi bagian penting dari ekosistem sawah. Kesuburan tanah ini memang sangat mempengaruhi hasil panen, seperti halnya juga dengan pemakaian

pupuk, akan tetapi kunci sebenarnya dalam kesinambungan fungsi produktif dari tanah ini adalah peranan air yang penting sekali kedudukannya dalam dinamika ekosistem sawah. Tingkat kesuburan dan proses penyediaan zat makanan yang diambil oleh tanaman padi dari tanah ternyata dipertahankan dan diganti dengan beberapa cara, yaitu : memasukkan zat hara dan mineral dengan mengalirkan air sungai; dengan cara menambat nitrogen yang dilakukan oleh ganggang-ganggang kehijau-hijauan yang mudah berkembang biak dalam air yang hangat; dengan cara pembusukan kimiawi dan bantuan bakteri pembusuk dari bahan organik yang sengaja dimasukkan ke sawah, termasuk sisa-sisa rumpun padi yang telah dituai dan tertinggal di dalam air; dengan pengisian udara pada tanah dengan gerak air sawah yang mengalir perlahan-lahan; dan tentu saja dengan berbagai fungsi-fungsi ekologis lainnya yang dilaksanakan oleh proses irigasi, yang belum sempat diketahui.

Walaupun tanaman padi sebenarnya memerlukan jumlah air yang tidak lebih banyak dari pada kebutuhan tanaman lahan tegalan akan air untuk keperluan penguapannya, namun fungsi air sebagai pengadaan zat makan dan mempertahankan sumber daya tanah itulah yang menyebabkan air dalam sistem pengairan sawah sangat penting artinya. Tidak heran jika sering dikatakan, bahwa di lahan sawah keadaan kuantitas dan kualitas air jauh lebih penting dari pada tipe tanah, dan bahkan boleh dikatakan bahwa tingkat kesuburan tanah yang rendah tidak menjadi penghalang apabila ada sumber daya air yang cukup (Geertz, 1976:31).

Berkaitan dengan penjelasan Geertz mengenai ekosistem sawah seperti tersebut di atas, teranglah bahwa penopang utama peranan Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi di Jawa Barat adalah adanya sumber daya alam berupa potensi sumber air yang telah dimanfaatkan oleh masyarakatnya sejak lama sekali. Dalam hal ini jelaslah betapa pilihan Sultan Agung Mataram pada abad ke 17 Masehi untuk menjadikan daerah yang berawa-rawa dan tidak produktif tersebut menjadi lahan pertanian sawah memang

tepat, karena tersedianya sumber daya air yang melimpah dan siap dialirkan ke lahan-lahan persawahan yang dicetak di bagian hilir sungai-sungai. Gagasan tersebut nampaknya bertolak dari pengalaman dan kearifan para petani disekitar Surabaya yang berhasil mengelola lahan persawahan di dataran rendah di sekitar delta Sungai Begawan Solo dan Sungai Brantas. Peningkatan kesejahteraan petani Surabaya berkat lahan pertanian tersebut rupanya juga mendorong pertumbuhan penduduk yang semakin berlebihan melampaui daya dukung sumber daya alamnya sendiri, sehingga sebagian perlu dipindahkan ke daerah lain.

Sebagian dari petani di daerah Surabaya itulah yang kemudian diboyong oleh Adipati Ranga Gede ke daerah muara Sungai Citarum di Karawang sekarang. Mereka berangkat sebagai migran baru yang ditugaskan membuka hutan rawa dan merubahnya menjadi lahan persawahan. Tindakan Sultan Agung itu membuktikan bahwa masyarakat-masyarakat tradisional di Indonesia secara alamiah telah memahami betapa kepadatan penduduk mendorong terjadinya pengeksploitasian sumber daya alam yang ada, akibatnya daya topang lingkungan menurun dan terjadilah bencana kelaparan dan kemiskinan. Untuk menghindari keadaan seperti itu maka sebagian penduduk petani tersebut harus dipindahkan ke daerah lain yang masih kosong. Jadi program transmigrasi, dalam arti pemecahan masalah ekonomi dan demografi dengan memindahkan sebagian penduduk daerah padat dan miskin ke daerah yang masih kosong dan subur sudah sejak lama dilakukan secara terencana oleh bangsa Indonesia sendiri, jauh sebelum Belanda melaksanakan program transmigrasi penduduk Jawa ke Sumatera pada awal akhir abad ke - 19 Masehi.

Perlu diketahui, bahwa Kerajaan Mataram Islam yang lebih cenderung berekspansi ke daerah pesisir utara Pulau Jawa, sesungguhnya masih mewarisi sebagian tradisi kerajaan Mataram Hindu dari abad ke-8, antara lain pemanfaatan hasil surplus pertanian sawah untuk mendukung kekuatan dan kekuasaanya. Menurut Geertz, sistem persawahan yang integral dan sungguh-

sebenarnya dibangun secara efektif agaknya mulai dibuat pertama kali di lembah-lembah dan sekitar daerah aliran sungai yang terdapat di bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Diduga daerah persawahan terasering (bertingkat-tingkat di lereng bukit) pertama kali muncul di sekitar lembah yang dibentuk oleh empat buah gunung berapi yang megah : Sumbing, Merbabu, Sindoro, dan Merapi. Dari keempat buah gunung itu mengalir sungai-sungai yang akan mengairi dataran di sebelah utara, timur dan selatan. Daerah inilah yang pada abad ke-8 berkembang menjadi pusat Kerajaan Mataram (Hindu). Dari sanalah tradisi pertanian sawah berlanjut terus ke sekitar daerah aliran Sungai Brantas, Bengawan Solo, Serayu, Bogowonto, dan Lukolo (Geertz, 1976:43).

Lahan persawahan yang pertama kali dibuka oleh migran dari Jawa Timur di Karawang pada abad ke-17 tersebut adalah di sekitar daerah aliran Sungai Citarum bagian hilir, dan tentu saja luasnya sama sekali belum seperti apa yang kita jumpai sekarang. Bagaimana pun tentulah petak-petak sawah tersebut dibuat dengan membuka dan meratakan hutan tropis lembab berawarawa, dan lahan yang jadi tentulah berada jauh di atas permukaan air sungai. Untuk mengalirkan air ke persawahan mereka, maka di bagian hulu dibuat bendungan dan saluran buatan, sehingga terbentuklah jaringan irigasi sederhana yang tetap akan mengalirkan air, walau di musim kemarau sekalipun.

Setelah zaman Sultan Agung, perluasan sawah di daerah ini berlaku secara evolusioner, artinya sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan bahan makanan pokok. Ekspansi perluasan persawahan di daerah yang termasuk ke dalam lingkup kebudayaan Kejawen di Karawang pada zaman pra-kolonial, dan sampai dengan pertengahan abad ke-19 yang lalu, terjadi secara berangsur-angsur, dan maju-mundur menurut kondisi lingkungan dan permintaan. Hanya campur tangan dan desakan dari kekuatan politik luar yang membuat perluasan sawah di Karawang ini mengalami peningkatan drastis selama beberapa periode. Periode yang paling penting adalah ketika pemerintah

Hindia-Belanda menerapkan kebijakan ekonomi penjajahan melalui sistem pertanian "Tanaman Paksa", yaitu suatu kebijakan bagaimana membuat agar penduduk pribumi tetap dalam keadaan semula, tetapi sekaligus juga membuat mereka itu menghasilkan produk pertanian untuk pasaran dunia, dan tentu saja dengan mendikte produksi dan menentukan harga secara monopolistik oleh Belanda.

Pada waktu itu sektor ekspor berkembang dan meluas karena didorong oleh meningkatnya harga barang pada perdagangan dunia, sehingga pemerintah Hindia-Belanda memaksa para petani mengusahakan pertanian tanaman ekspor, seperti tebu, nila, kopi, tembakau, dan tanaman perdagangan lainnya. Sementara itu untuk mengimbangi peralihan kegiatan pertanian kepada tanaman non-pangan tersebut Belanda sengaja mempertinggi produksi beras di daerah-daerah yang dianggap sebagai "lumbung beras", seperti di Karawang, Inderamayu, Cirebon dan beberapa tempat lain di pesisir utara Pulau Jawa. Kebijakan Belanda ini telah mendorong usaha pembukaan lahan kritis menjadi sawah-sawah produktif dengan bantuan sistem pengairan modern: membendung sungai dan mengalirkan airnya ke sawah-sawah melalui saluran-saluran primer dan sekunder. Di daerah Karawang sendiri kebijakan tersebut diwujudkan dengan membangun bendungan-bendungan di beberapa ruas sungai Citarum dan Cilamaya, serta anak-anak sungai lainnya. Sejak itu lahan pertanian sawah irigasi di Karawang telah menjadi luas beberapa kali lipat dari pada persawahan yang pertama kali dibangun oleh migran dari Mataram.

Secara geografis daerah Karawang dekat sekali dengan wilayah adat suku bangsa Sunda, akan tetapi karena berbagai sebab seperti unsur kehidupan ekonomi dalam kebudayaan Sunda lebih didominasi oleh tradisi perladangan. Di daerah pegunungan seperti sekitar daerah Sumedang dan Tasikmalaya, Bogor dan Bandung juga terdapat lahan persawahan akan tetapi luasnya hanya menempati kira-kira 15% dari seluruh wilayah, padahal di Kejawaen (daerah adat orang Jawa) mencapai 35%. Jadi bukan berarti orang Sunda tidak suka bersawah, tapi sebenarnya lebih

disebabkan oleh keadaan topografi dan kesuburan tanahnya yang dianggap tidak menunjang perkembangan pertanian sawah. Seperti kata Geertz, bahwa tanah pegunungan Sunda sebenarnya memiliki air yang cukup banyak dan drainase yang baik, tetapi tingkat kesuburannya rendah - karena penapisan yang meningkat - dan susunan topografinya kurang cocok untuk persawahan (Geertz, 1976:47).

Sementara itu penambahan penduduk di pedalaman Jawa Barat telah mendorong sebagian dari anggota suku bangsa Sunda untuk mencari lahan pertanian yang masih kosong ke berbagai daerah lain, diantaranya ada yang membuka ladang di daerah perbukitan di bagian selatan Karawang. Karena meniru keberhasilan para petani di bagian utara, maka sebagian dari petani Sunda di bagian selatan Karawang ini juga mencoba membuat persawahan. Tapi sumber daya air yang tetap dari daerah aliran sungai sulit didapat dan waktu itu belum didukung oleh sistem irigasi modern, maka sawah-sawah orang Sunda seperti di Klari, Pangkalan, dan Telukjambe tergolong sawah tadah hujan.

Pada masa sekarang sebagian besar lahan persawahan di daerah Kabupaten Karawang mengandalkan sistem irigasi yang cukup modern dan efektif. Sungguhpun begitu ketergantungan kepada daya dukung alam tetap tidak bisa dihindari, karena bagaimanapun air sungai Citarum yang dibendung di beberapa tempat adalah air dari daerah pegunungan yang masih sempat meresap dan bergerak perlahan setelah hujan. Air bendungan dari waduk Walahar misalnya dialirkan melalui dua saluran primer, yaitu Saluran Induk Tarum Barat dan Saluran Induk Tarum Timur. Dalam hal ini berlaku hukum alam, dimana air hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dalam hal ini dapat dimaklumi mengapa lahan-lahan persawahan yang terletak di bagian selatan dari kedua saluran induk tersebut tidak dapat diairi, sehingga terpaksa tetap menunggu datangnya musim hujan baru dapat ditanami. Lebih parah lagi sawah-sawah yang terdapat di sekitar saluran induk bagian hulu, walau dapat diairi sekalipun,

tetap saja tidak boleh diairi pada musim kemarau, karena saluran induk tersebut hanya diperuntukkan untuk menjaga kesinambungan produktifitas sawah-sawah bagian utara. Kondisi demikian tidak berarti sawah-sawah tersebut lalu digolongkan sebagai tidak produktif, karena bagaimanapun tetap diandalkan oleh petani pemiliknya sebagai penghasil padi bagi kebutuhan hidup setahun. Bedanya dengan sawah berpengairan di bagian utara hanyalah keterbatasan masa produksinya, yang sangat tergantung kepada curah dan musim hujan.

(b) *Perindustrian*

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 53 tahun 1989, Kabupaten Karawang dinyatakan sebagai kawasan industri. Namun perkembangan Karawang sebagai daerah tempat berdirinya berbagai pabrik dan kegiatan industri boleh dikatakan telah terjadi jauh sebelum adanya surat keputusan presiden. Surat tersebut tidak lain untuk memperkokoh kedudukan kabupaten Karawang secara formal sebagai salah satu Kawasan industri. Di Kecamatan Klari sendiri sebelumnya juga sudah ada sejumlah industri, terutama di sekitar jalur jalan raya Pantura, namun sejak tahun 1989, pertumbuhan kegiatan industrinya di bidang/sector berjalan demikian cepat. Posisinya yang berada di daerah yang mudah dilalui oleh hampir semua jalur transportasi darat, serta kemudahan dalam pembebasan lahan-lahannya yang tidak produktif, sekarang menjadikan Kecamatan Klari sebagai "Zone industri".

Jakarta, sebagai ibukota dan pusat perekonomian negara, tampaknya sudah terlalu sarat dengan sarana dan prasarana industrialisasi sebagai asset negara. Jumlah lahan yang tersedia sudah tidak mampu lagi menampung beban berdirinya pabrik-pabrik, pusat-pusat perkantoran, kompleks perumahan, dan sebagainya. Oleh sebab itu untuk memperluas kebutuhan akan lahan kosong, pengeksploitasian lahan mulai merambah ke daerah-daerah kantong di sekitarnya, termasuk Kabupaten Karawang.

Selain itu, dalam rangka mengurangi tekanan perpindahan penduduk (urbanisasi) ke Jakarta, pemerintah dengan sengaja telah mengembangkan pusat-pusat pemukiman dan kegiatan industri baru di sekitar Jakarta dengan memasukkan Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cibitung, serta Karawang dalam suatu kesatuan pengembangan wilayah.

Namun selama ini sering kali terjadi pembebasan tanah di Jakarta sebagai perluasan lahan industri, kerap menimbulkan konflik antara penduduk pemilik dan penggarap dengan pengusaha, terutama disebabkan ketidakcocokan dalam masalah jumlah uang penggantian (ganti-rugi). Di samping itu harga tanah di Jakarta sendiri kian melonjak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu banyak pemilik perusahaan/industri yang meluaskan usahanya dengan membeli lahan di luar Jakarta, di mana harga tanah lebih murah.

Para spekulasi tanah dan para pengusaha besar dari Jakarta sudah sejak sepuluh tahun yang lalu berlomba-lomba membeli lahan secara besar-besaran untuk didirikan pabrik atau kawasan pemukiman di atasnya. Hal ini merupakan kesempatan bagi penduduk setempat untuk menjual tanah-tanah mereka dengan patokan harga tinggi. Bagi penduduk Kecamatan Klari, bukan menjadi masalah bila lahan mereka dibeli, karena memang kebanyakan mereka tidak memanfaatkan tanah tersebut. Mereka merasa senang apabila ada pihak yang mau membeli tanah mereka yang memang tidak produktif (untuk dijadikan lahan tanaman pangan), kondisi sekarang merupakan suatu kesempatan yang memberi keuntungan bagi mereka, karena ada pihak yang mau membeli lahan kritisnya. Keuntungan lain yang mereka peroleh adalah mereka bisa menentukan harga jual yang tinggi, yang bisa mereka belikan tanah lagi yang lebih luas di desa-desa lain.

Dengan didirikannya berbagai pabrik untuk mendukung usaha pembangunan nasional di sektor perindustrian, serta berdirinya berbagai jenis dan kelasifikasi kompleks pemukiman,

dengan sendirinya terjadi perubahan dalam usaha pemanfaatan dan pengeksploitasian sumber daya alam yang ada. Lahan yang tadinya dimanfaatkan penduduk untuk ditanami jenis tumbuh-tumbuhan tanah kering atau hanya dibiarkan saja oleh pemiliknya, sekarang mulai dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk didirikan pabrik atau kompleks pemukiman serta rekreasi di atasnya. Pada akhirnya di Kecamatan Klari hampir tidak lagi ditemukan tanah-tanah kosong yang terbengkalai. Kalaupun ada hanyalah sebagian kecil tanah yang tidak jelas status hukumnya.

Demikian pula halnya dengan sumber air dari bendungan selain dimanfaatkan untuk mengairi sawah juga digunakan untuk keperluan industri. Kebutuhan air, di samping untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk menunjang jalannya proses produksi pada pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik besar sangat membutuhkan air dalam kapasitas besar guna proses produksinya. Pemerintah daerah pengembangan kegiatan pengolahan air bersih tersebut dialirkan oleh Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Karawang masuk ke pabrik-pabrik dan kompleks perumahan melalui pipa-pipa besar. Adanya sumber air inilah yang rupanya juga menarik minat para pengusaha untuk mendirikan pabrik serta kompleks permukiman di Klari.

Meskipun pabrik-pabrik memanfaatkan sumber air yang ada dalam kapasitas banyak, namun hal itu tidak mempengaruhi kebutuhan air penduduk setempat. Penduduk masih dapat memperoleh air bersih sebanyak yang mereka butuhkan, antara lain karena penduduk asli lebih suka menggunakan air tanah, dari sumur-sumur timba atau pompa. Sebagian kecil penduduk memang memanfaatkan air sungai untuk mencuci dan membuang limbah, walaupun keluhan pencemaran berasal dari limbah pembuangan pabrik pernah mereka lontarkan. Walaupun pada umumnya pabrik-pabrik tersebut memiliki sistem pembuangan limbah tersendiri yang jauh dari sumber air untuk konsumsi penduduk, tapi tetap ada pengusaha-pengusaha yang bandel dan tidak mematuhi Undang-Undang Lingkungan. Secara umum dapat

dikatakan, bahwa keberadaan pabrik-pabrik tersebut belum sampai menimbulkan masalah kelestarian lingkungan yang secara langsung merugikan pola kehidupan penduduk setempat.

Bagaimanapun, secara ekologi, keberadaan sarana pelayanan umum (public service) yang ada di Kecamatan Klari, seperti pabrik-pabrik, kompleks perumahan, serta rekreasi, membawa pengaruh tersendiri bagi sistem ekologi setempat. Sebagai contoh, di desa Kiarapayung sudah tidak ada lagi pemukiman penduduk asli, karena hampir seluruh lahannya telah dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan tekstil besar untuk mendirikan pabrik-pabrik dan pemukiman bagi karyawannya. Dengan demikian sistem ekologi yang berlaku untuk suatu pola pemukiman berubah fungsinya untuk industrialisasi. Begitu pula, seperti telah disebutkan sebelumnya, pembangunan industri tetap berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian di Kabupaten Karawang pada umumnya, khususnya di Kecamatan Klari.

Sungguhpun industri modern dicirikan oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan (khususnya ekonomi dan ilmu-ilmu eksakta terapan) dan sistem teknologi yang efisien, akan tetapi kegiatan industri juga menempati ruang dan waktu yang membumi, dalam arti tetap tergantung kepada daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya alam. Karena itu berbagai kegiatan ekonomi industri yang berkembang akhir-akhir ini harus dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan politik dan kenyataan-kenyataan sosial ekonomi di lapangan. Karena itu uraian mengenai dampak ekologi karena pertumbuhan kegiatan industri di Karawang ini juga perlu dilihat dari tolok ukur pengembangan industri berwawasan lingkungan, sebagaimana kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang dicanangkan pemerintah.

Berkenaan dengan kebijakan, bahwa pembangunan industri nasional diselenggarakan sesuai dengan amanat GBHN dan selalu berpedoman kepada Trilogi Pembangunan. Dalam pembangunan jangka panjang tahap I yang lalu trilogi pembangunan nasional

berorientasi kepada : (1) kemampuan mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, yaitu industri yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh, (2) menempatkan industri sebagai penggerak utama pembangunan, dan (3) dunia industri Indonesia harus siap tinggal landas dalam pembangunan jangka panjang tahap II ini.

Berkenaan dengan kebijakan pokok ini dapat dipahami, bahwa kegiatan pertanian (sawah) dan industri di daerah Kabupaten Karawang mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah pusat dan daerah, mengingat kedua bidang inilah yang memiliki potensi paling besar di kabupaten ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pelaksanaan program peningkatan hasil pertanian, baik lewat intensifikasi pembibitan dan pemupukan, maupun dengan penerapan dan mekanisasi dan peningkatan permodalan petani. Sementara itu di bidang industri dapat dilihat secara nyata, betapa pertumbuhan pabrik-pabrik dan kegiatan berbagai bentuk dan kelas industri di Kabupaten Karawang ini berjalan dengan pesat. Jika areal pertanian sawah cenderung untuk berkurang sedikit demi sedikit, sebaliknya areal industri, baik untuk kawasan maupun zona industri semakin bertambah.

Dalam memacu pembangunan nasional, pembangunan industri sekaligus mendorong terciptanya suatu bentuk masyarakat industri dengan segala ciri kehidupan yang semakin berbeda dengan ciri kehidupan masyarakat agraris tradisional. Pertumbuhan penduduk adalah bagian lain yang termasuk ke dalam terciptanya masyarakat industri. Namun pertumbuhan penduduk hanyalah salah satu dari banyak masalah kunci yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang terjadi pada masa kini. Fakta pokok yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan secara global adalah teknologi yang mencamari (*polluted technology*) yang mendorong konsumsi barang mewah (*affluent consumption*) dan limbah yang dihasilkan oleh kedua hal tersebut. Sebaliknya menurut Soerjani (1994:78) juga disertai oleh kekurangtepatan kebijaksanaan (kearifan), jeratan kemiskinan terstruk, dan kurangnya rasa tenteram.

Keadaan yang diasumsikan sebagai bentuk dampak lingkungan akibat industri dan kehidupan masyarakat industri maju tersebut bukan saja mirip dengan yang sedang berlangsung di Indonesia, tetapi juga dapat kita lihat secara lansung di daerah yang sedang mengalami pertumbuhan industri tinggi seperti di Kabupaten Karawang ini. Dalam penelitian ini tidak menunjuk langsung kepada pembuktian tentang adanya data kuantitatif tentang dampak industri tersebut, karena memang bukan itu tujuan penelitian ini. Namun disini akan diungkapkan apa-apa saja dampak lingkungan yang secara logis dapat dan telah terjadi di sekitar Kabupaten Karawang.

Tingginya tingkat perkembangan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Karawang ini selain karena suntikan dana APBD dan APBN, juga karena pertumbuhan dan perkembangan sektor industri yang dapat diukur dari penanaman modal (investasi) oleh pihak swasta seperti tergambar dalam tabel berikut.

TABEL 5.

**PERSENTASE INVESTASI DI BIDANG INDUSTRI DI
KABUPATEN KARAWANG 1995**

No.	Jenis Permodalan	Besarnya Dalam Juta Rupiah	%
1.	Modal Asing	162.729	-
2.	Modal dalam negeri	1.820.293	-
3.	Non fasilitas	35.676	-
4.	Industri kecil formal	3.002	-
5.	Industri kecil non formal	3.649	-
J u m l a h		2.025.348	100

Sumber : Laporan Pelaksanaan Tugas Bupati Karawang 1995 .

2. Dampak Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Sebagian besar penduduk Kecamatan Klari atau Kabupaten Karawang pada umumnya dapat digolongkan sebagai penduduk asli, yaitu penduduk yang secara turun temurun sudah mendiami dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah itu untuk kelangsungan hidup mereka. Penduduk asli ini juga saling menjalin hubungan sosial, bahkan dengan mengadakan hubungan kekerabatan lewat ikatan perkawinan dengan penduduk dari desa-desa lain. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hubungan sosial di antara mereka relatif erat. Hal ini dapat dilihat pada saat penyelenggaraan upacara-upacara adat perkawinan dan kematian, atau aktivitas lain yang membutuhkan banyak tenaga manusia. Sikap paguyuban dan primordialisme kekerabatan mereka sering terwujud dalam berbagai kegiatan gotong royong dan tolong menolong lainnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan, bahwa pola kehidupan tradisional mereka berorientasi pada kebudayaan petani.

Sebagai salah satu daerah yang "terbuka" serta memiliki potensi dan posisi yang strategis, tidak mengherankan kalau Klari juga mengalami secara langsung berbagai dampak pembangunan (dari ibukota) dan perkembangan kehidupan masyarakat urban. Desa-desanya didatangi oleh banyak orang dari Jakarta dengan berbagai tujuan serta dari berbagai golongan. Ada di antara pendatang itu yang datang membeli lahan yang ada untuk mendirikan pabrik atau perumahan, sementara yang lain bertujuan mengadu nasib atau mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik, karena mereka melihat peluang kerja di pabrik-pabrik yang baru didirikan.

Penduduk pendatang ini memiliki gaya hidup yang berbeda dengan penduduk setempat, karena berasal dari dan berorientasi pada pola hidup modern kota metropolitan. Penduduk pendatang yang merupakan para pendukung dunia industri moderen yang tidak punya kesempatan lagi untuk memahami ataupun bergaul

dengan masyarakat setempat. Tanpa disadari, mereka membawa pengaruh kehidupan kota terhadap pola kehidupan penduduk setempat. Gaya hidup, sikap dan perilaku, serta tata cara berpakaian banyak dicontoh oleh penduduk setempat, yang cenderung tanpa pertimbangan lebih jauh. Sikap meniru ini yang dapat merupakan salah satu indikator perubahan pola kehidupan dan kebudayaan mereka.

Hubungan sosial yang terjalin antara penduduk asli dengan para pendatang yang berasal dari golongan ekonomi bawah dan merupakan bagian marginal dari masyarakat industri tersebut dapat dikatakan cukup akrab, terutama dengan para pendatang yang bekerja di sektor-sektor informal. Hal ini dapat dilihat pada hubungan ketetanggan di antara mereka, di mana para pendatang dapat membaur dan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan setempat. Begitu pula, tampaknya penduduk asli sendiri bisa menerima mereka yang kebanyakan bekerja sebagai buruh dengan keadaan ekonomi yang relatif sama dengan penduduk setempat.

Sebaliknya, hubungan penduduk asli dengan para pemilik, pimpinan pabrik/perusahaan, dan pelaku aktif kegiatan industri cenderung kurang akrab. Hal ini bukan saja disebabkan karena mereka tidak bertempat tinggal di Klari, mereka hanya datang untuk bekerja saja, tapi juga karena mereka hampir tidak ada perhatian kepada warga setempat. Walaupun mereka menetap di daerah itu, mereka bermukim di kompleks perumahan eksklusif yang terpisah secara fisik dan sosial dari lingkungan pergaulan dengan penduduk setempat. Dengan demikian hubungan sosial mereka pun eksklusif, walaupun ada itupun hanya dengan penduduk yang masih sama-sama tinggal satu kompleks perumahan dengan mereka. Keadaan ini dapat juga disebabkan karena adanya jurang perbedaan dan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang amat jauh di antara kalangan "industriawan" itu dengan penduduk asli. Walaupun ada interaksi sosial antara dua golongan yang berbeda itu, hanya sebatas hubungan antara majikan dengan buruh, ataupun hubungan formal dengan para pejabat pemda setempat.

Pengaruh yang langsung dirasakan oleh penduduk setempat, antara lain berkaitan dengan sikap, perilaku dan gaya hidup yang dibawa oleh para pendatang. Para pendatang, ketika pertama kali tiba di Klari, cenderung masih menunjukkan gaya hidup "kota" dalam interaksi sehari-hari. Dapat dimaklumi, karena sebagian besar di antara mereka semula datang ke Jakarta dari tempat asal masing-masing untuk mencari nafkah. Oleh karena kurang beruntung di ibukota tidak memperoleh pekerjaan atau mereka bekerja secara serabutan atau bahkan hanya menganggur selama tinggal di ibukota, mereka memutuskan pindah ke Kabupaten Karawang (termasuk Klari) untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik yang baru didirikan. Walaupun mungkin hanya sebentar tinggal di Jakarta, namun paling tidak mereka sudah terpengaruh gaya hidup kota metropolitan. Pengaruh inilah yang masih dibawa ketika mereka pindah ke Kabupaten Karawang. Kedatangan mereka secara tidak langsung memperkenalkan budaya kota kepada masyarakat setempat.

Dalam bersikap dan bertingkah laku, tanpa disadari para pendatang tersebut menjadi contoh yang kemudian ditiru oleh penduduk setempat. Misalnya, ketika menggunakan kata-kata dalam suatu pembicaraan, seringkali mereka mengucapkan kata-kata dengan gaya bahasa tertentu yang lazim diucapkan oleh remaja-remaja kota Jakarta. Bisa jadi hal ini untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah tinggal di Jakarta, yang merupakan kota dambaan untuk didatangi oleh orang-orang desa atau mereka yang ingin mengadu nasib. Kebiasaan ini akan dicontoh oleh penduduk setempat yang belum pernah mendengar sebelumnya, dan pada akhirnya tampaknya sudah menjadi bagian dari interaksi sehari-hari di antara mereka.

Sikap meniru yang lain, umpamanya dalam cara berpakaian. Sebelum banyak pendatang yang masuk ke daerah ini, umumnya penduduk setempat lazim mengenakan pakaian yang sederhana untuk sehari-hari, baik kaum pria maupun kaum wanita. Sedangkan untuk menghadiri suatu perayaan/pesta, mereka biasa

mengenakan pakaian tradisional daerah Jawa atau Sunda. Namun, para pendatang memperkenalkan jenis pakaian yang lazim dikenakan orang-orang kota, baik untuk sehari-hari maupun untuk pergi ke pesta. Masyarakat setempat telah biasa memakai jenis pakaian khas anak muda kota entah berupa celana blue-jeans, T-shirt (kaos oblong), celana pendek gaya wisatawan Bermuda, atau baju panjang (long-dress) ketat yang bisa dikenakan sehari-hari. Sedangkan untuk pergi ke pesta, mereka mulai meninggalkan pakaian tradisional. Mereka lebih suka mengenakan celana panjang atau rok mini/pendek (untuk wanita), pantolan dan jas (untuk laki-laki), atau pakaian lain dengan model yang lebih modern. Pakaian ini masih ditambah dengan menggunakan seperangkat perhiasan dari emas yang sering dipakai secara berlebihan, seperti gelang, kalung, cincin, dan sebagainya.

Seringkali pula para pendatang tersebut membawa barang-barang untuk dijual kepada teman-temannya dengan pembayaran secara mengangsur (kredit), baik berupa barang-barang elektronik, ataupun perhiasan emas, pakaian mewah, dan lain-lain. Karena dijual dengan cara mengangsur atau dicicil, tentunya menarik minat penduduk setempat yang belum memiliki atau bahkan belum pernah melihat. Tidak jarang mereka membeli bermacam-macam barang tersebut sekaligus, yang kalau ditotal bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu rupiah. Akan tetapi minat mereka terhadap barang itu sangat besar, sehingga harga bukan menjadi masalah bagi mereka walaupun mereka tidak berpenghasilan tetap (seperti sudah disebut sebelumnya, bahwa kebanyakan penduduk setempat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu).

Sementara itu bagi pendatang yang menjual barang-barang itu, pekerjaan ini merupakan pekerjaan sampingan di samping pekerjaan utama mereka sebagai buruh pabrik. Tanpa mereka sadari, pola hidup konsumtif mulai merasuk dalam kehidupan mereka. Barang-barang mewah yang dianggap dapat menaikkan gengsi, sangat cepat menarik minat orang-orang desa untuk me-

milikinya. Di samping itu, saat ini sudah banyak toko-toko yang menjual barang-barang tersebut di Kabupaten Karawang yang umumnya dimiliki oleh para pendatang.

Pola hidup yang cenderung menjadi konsumtif itu didorong oleh kondisi ekonomi masyarakat setempat yang sudah menjadi lebih baik. Dapat dikatakan, bahwa sejak dibukanya berbagai bidang industri, terjadi peningkatan taraf ekonomi masyarakat secara cukup pesat. Penduduk yang tadinya bekerja hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan sedikit dan tidak menentu, banyak yang beralih pekerjaan di bidang lain. Sebagai contoh, para wanita dewasa yang tadinya hanya bekerja sebagai buruh tani atau membantu orang tuanya bertani, banyak yang diterima bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik dengan upah yang cukup besar serta secara tetap diterima. Dengan demikian penghasilan yang diterima sudah pasti lebih besar dibandingkan apabila mereka bekerja di bidang pertanian, dan lebih bisa diharapkan, dan dapat diterima setiap dua minggu sekali.

Sebagian besar pabrik yang ada kebanyakan menerima buruh perempuan dari pada buruh laki-laki dari penduduk setempat. Menurut anggapan para pemilik pabrik, buruh perempuan lebih rajin, lebih teliti, lebih tekun, dan lebih berhati-hati dalam bekerja. Sedangkan buruh laki-laki kebanyakan diambil daerah-daerah lain di luar Kabupaten Karawang, dengan alasan seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya). Bagi para laki-laki penduduk setempat yang belum mendapat pekerjaan, mereka memanfaatkan waktu sebagai tukang ojek (sepeda motor yang disewakan, dengan penumpang duduk di boncengannya).

Menjadi tukang ojek memang merupakan suatu pekerjaan yang baru bagi mereka. Sejak banyak pabrik didirikan dan banyak migran yang datang ke Klari, dibutuhkan suatu sarana transportasi yang dapat mencapai ke desa-desa yang letaknya jauh dari jalan raya. Meskipun sarana angkutan sudah banyak yang melewati Kecamatan Klari, namun tidak sampai menempuh desa-

desa yang jauh dari jalan raya. Padahal tidak sedikit pabrik yang didirikan di lokasi tersebut. Oleh sebab itu untuk sampai ke tempat tujuan, jasa kendaraan ojek sangat dibutuhkan keberadaannya. Selain itu banyak pula buruh pabrik yang tinggal jauh dari tempat kerja, yang hanya dapat ditempuh dengan naik ojek.

Pada umumnya para penarik ojek ini adalah mereka yang tidak memiliki lahan pertanian. Penghasilan yang diperoleh sebagai tukang/pengemudi ojek lebih banyak daripada penghasilan sebagai buruh tani. Di samping itu pekerjaan ini dapat untuk mengisi waktu luang mereka daripada tidak bekerja sama sekali.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, menarik ojek memang merupakan suatu pekerjaan alternatif yang sengaja dipilih mereka. Dari uang penjualan tanah, mereka belikan sepeda motor untuk dijadikan ojek. Dengan penghasilan yang diperoleh itu para penarik ojek mencukupi kebutuhan rumah tangganya sebagai kepala keluarga, atau untuk mencukupi kebutuhan sendiri bagi mereka yang masih lajang daripada meminta terus dari orang tua.

Tenaga kerja wanita yang beruntung diterima bekerja di pabrik ada yang sebagai buruh lepas atau buruh tetap. Rata-rata usia mereka termasuk kategori usia produktif, walaupun ada di antara mereka yang sudah berkeluarga. Untuk ukuran setempat, penghasilan sebagai buruh sudah cukup memadai guna mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada mereka tidak bekerja sama sekali. Apabila ada seorang anak gadis dari suatu keluarga diterima bekerja di pabrik, berarti dapat menambah penghasilan keluarga serta meringankan beban ekonomi orangtuanya. Begitu pula mereka dapat mencukupi kebutuhan sendiri, termasuk membeli barang-barang yang dibeli secara cicilan dari para pendatang. Sehingga tidak mengherankan pola hidup konsumtif mulai melanda mereka.

Kehadiran pabrik-pabrik di samping membuka kesempatan kerja, juga memberi peluang membuka usaha-usaha lain yang bersifat jasa. Sekarang ini banyak penduduk yang mendirikan

rumah-rumah kecil berderet (rumah petak) untuk disewakan/dikontrakan bagi para pendatang yang membutuhkan tempat tinggal. Setiap derete bisa terdiri dari 4-6 buah rumah. Harga sewa rumah petak semacam itu masih relatif murah, berkisar antara Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- setiap bulan, tergantung pada kondisi rumah itu sendiri. Biasanya setiap rumah terdiri atas dua ruangan saja, tanpa kamar mandi (kamar mandi dan kakus biasanya dibuat di belakang deretan rumah itu, yang digunakan secara bersama-sama dengan penghuni rumah sewaan yang lain). Sedangkan tarif sewa rumah yang lebih mahal jika ada kamar mandi dan kakus tersendiri di dalam rumah. Pendapatan yang diperoleh penduduk setempat dari menyewakan rumah lumayan besar. Terbukti para pemilik rumah sewaan semacam itu bisa hidup berlebihan menurut ukuran setempat. Rumah-rumah mereka sendiri tampak megah dengan perabotan rumah tangga yang lengkap dan mewah. Seperangkat barang elektronik menghiasi rumah mereka, memberi kesan bahwa penghuninya adalah keluarga yang tergolong berada dan tinggi taraf ekonominya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang telah menunaikan ibadah haji.

Keuntungan dengan adanya pabrik-pabrik di daerah ini bukan saja dirasakan oleh penduduk setempat, tetapi juga oleh penduduk pendatang yang sudah lama menetap maupun yang belum berapa lama menetap. Ada di antara mereka yang mendirikan toko kelontong, warung atau kedai makanan untuk melayani buruh-buruh pabrik serta orang-orang lain yang datang atau bekerja di Klari. Banyak perusahaan yang tidak menyediakan makan siang bagi para pekerjanya, sehingga kehadiran warung atau kedai makanan sangat berarti bagi mereka. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, mereka bisa mendapatkan sepiring nasi dengan lauk-pauk yang dapat mengenyangkan perut dan memulihkan tenaga. Begitu pula bagi mereka yang membutuhkan barang-barang kelontong atau kebutuhan memasak, dapat diperoleh di warung-warung yang bertebaran di sana.

Meskipun tidak terlalu besar, namun para pemilik toko, warung, atau kedai paling tidak memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Keuntungan ini sebagai tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, terutama untuk biaya pendidikan anak-anak. Menurut keterangan beberapa orang di antara mereka, dengan membuka usaha tersebut kondisi ekonomi mereka sedikit banyak mengalami peningkatan.

B. MOBILITAS SOSIAL PENDUDUK

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kecamatan Klari telah menjadi daerah yang "terbuka" ialah dengan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk ukuran suatu daerah kecamatan. Sejak jalan bebas hambatan (tol) Jakarta - Cikampek dibuka, Kecamatan Klari praktis terbuka untuk berbagai kegiatan pembangunan, terutama dalam menunjang pembangunan industri.

Kemudahan-kemudahan ini juga menjadi daya tarik penduduk dari luar untuk datang ke sana, baik sebagai pemilik, karyawan tetap maupun sebagai buruh harian di sektor industri. Sekarang orang mudah keluar-masuk Kecamatan Klari dalam waktu relatif singkat, karena bisa melewati jalan bebas hambatan yang cukup lancar, dan tanpa rasa kuatir tidak ada kendaraan yang menuju ke sana. Saat ini pun sudah banyak kendaraan umum ke berbagai jurusan, termasuk ke Jakarta serta kota-kota lain di pulau Jawa, yang melewati Kecamatan Klari.

1. Mobilitas Penduduk Asli

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang mudah serta lancar sangat menguntungkan bagi penduduk Klari. Sekerang mereka dengan mudah pergi ke luar daerah, bahkan bisa mencapai ke kota-kota lain di pulau Jawa. Kota utama yang menjadi tujuan mereka adalah Jakarta, karena di Jakarta mereka dapat mengembangkan usaha (misalnya berdagang) atau mencari pekerjaan. Tanpa disadari, mereka

mulai menyerap pola kehidupan perkotaan kedalam kehidupan sosial mereka sendiri. Begitu pula pengetahuan dan wawasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah perkotaan menjadi bertambah, terutama pengetahuan mengenai IPTEK(Ilmu pengetahuan dan teknologi) yang selama ini didominasi oleh masyarakat kota.

Namun, yang lebih penting lagi berkaitan dengan keberadaan Kabupaten Karawang sebagai daerah penyangga ibukota, adalah kelancaran arus pengiriman (distribusi) hasil-hasil produksi dari Kabupaten Karawang ke ibukota. Dalam hal ini terutama distribusi beras serta bahan-bahan bangunan, seperti batu bata, dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta. Distribusi tersebut dapat berlangsung dengan mudah dan lancar serta cepat dengan adanya prasarana jalan yang semakin meningkat.

Demikian pula perhubungan antara desa yang satu dengan yang lain dalam wilayah Kabupaten Karawang juga mudah terjangkau. Hal ini menyebabkan interaksi sosial dan komunikasi penduduk antardesa menjadi lebih intensif. Tidak tertutup kemungkinan perkawinan penduduk antar-desa juga semakin meningkat frekuensinya.

Sebaliknya, saat ini di Klari menetap banyak penduduk pendatang dari berbagai latar belakang etnik, seperti orang Jawa, Minangkabau, Cina, dan lain-lain. Sudah barang tentu mereka datang dengan tetap membawa kebudayaan masing-masing. Mereka membaaur dan beradaptasi dengan penduduk setempat, sehingga timbul kontak-kontak budaya pada mereka. Tidak jarang terjadi perkawinan campur antara penduduk asli dengan pendatang yang berbeda latar belakang budayanya.

Apabila antara penduduk asli dengan para pendatang tidak bisa mengembangkan rasa solidaritas yang tinggi, dapat menimbulkan konflik atau masalah-masalah sosial lainnya di antara mereka sebagai akibat kesalahpahaman dalam memahami budaya pihak lain. Namun selama ini belum pernah timbul pertengahan yang hebat antara penduduk setempat dengan pendatang.

2. Masalah Penduduk Pendatang

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa jika di suatu daerah mulai ada kegiatan industrialisasi, berarti mengandung orang-orang dari luar datang ke daerah itu dengan berbagai tujuan. Sementara industrialisasi itu sendiri membutuhkan banyak tenaga kerja, tenaga kerja tersebut dapat di peroleh di samping itu juga dari para pendatang. Tidaklah mengherankan jika pada akhirnya berduyun-duyun pendatang masuk ke Kabupaten Karawang, termasuk ke Kecamatan Klari yang paling banyak berdiri pabrik-pabrik.

Tujuan utama mereka datang ke sana adalah untuk mencari kerja di pabrik-pabrik. Meskipun demikian tidak sedikit di antara mereka yang menjalankan usaha lain, seperti membuka toko-warung/kedai, menjadi supir angkot (angkutan kota), dan sebagainya. Tidak sedikit pula di antara pendatang yang menetap di Klari dalam jangka waktu lama, bahkan ada di antara mereka yang menikah dengan penduduk setempat.

Kedatangan orang-orang dari luar daerah ini bukanya tidak menimbulkan masalah. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki surat identitas atau kartu Tanda Penduduk (KTP), karena ketika mereka datang tidak melaporkan diri pada aparat pemerintah daerah setempat. Hal ini mengakibatkan petugas pencatatan penduduk menemui kesulitan mendata penduduk yang datang/masuk atau pergi/keluar. Padahal data tersebut sangat penting untuk sensus penduduk, juga penting dalam rangka penelitian ini terutama untuk mengetahui mobilitas penduduk.

Masalah-masalah sosial yang biasa timbul bila dalam suatu daerah ada banyak penduduk pendatang, antara lain yang berkaitan dengan kesempatan kerja. Berdasarkan keterangan, pada kenyataannya sebagian besar pabrik-pabrik yang ada di Klari memanfaatkan tenaga kerja laki-laki dari daerah. Dengan pertimbangan tertentu, para pemilik perusahaan menilai orang-orang dari luar daerah lebih dapat diandalkan dalam bekerja.

Kondisi seperti itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial pada penduduk setempat. Namun pada kenyataannya mereka bisa menerima keadaan tersebut dengan mengalihkan pekerjaan pada usaha-usaha lain, yang tanpa mereka sadari justru turut menunjang industrialisasi itu sendiri, seperti menjadi tukang ojek, menjual berbagai jasa, dan lain-lain. Walaupun mereka tidak secara langsung berhubungan dengan proses industri, namun kelancaran proses industri tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha yang mereka jalankan.

Ada sementara pendapat yang mengatakan, bahwa masuknya para pendatang dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan penduduk asli dapat menimbulkan benturan-benturan atau konflik sosial. Salah satu wujud dari konflik tersebut adalah meningkatnya kriminalitas di daerah tersebut, yang antara lain disebabkan diantara kedua belah pihak atau penyebab-penyebab lainnya. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh, selama ini tingkat kriminalitas di Klari relatif tidak tinggi. Data yang berhasil dicatat, dalam beberapa tahun belakangan ini hanya terjadi satu kali kasus pembunuhan. Peristiwa tersebut terjadi karena timbul kesalahpahaman antara seorang penduduk setempat dengan penduduk dari luar daerah yang sedang dalam keadaan mabuk. Hanya peristiwa itu yang dilaporkan kepada petugas Kecamatan Klari. Sedangkan tindakan-tindakan kriminalitas yang lain, seperti pencurian, penodongan, dan sebagainya, nyaris tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi, frekwensinya relatif rendah.

Masalah sosial lain yang kerap timbul berkaitan dengan migrasi adalah timbulnya prostitusi (praktek pelacuran). Tidak bisa dipungkiri, bahwa di wilayah Kecamatan Klari dan Kabupaten Karawang umumnya juga terdapat praktek-praktek pelacuran, baik secara terselubung maupun terang-terangan. Kecenderungan ini terutama terjadi di sepanjang jalan raya Pantura yang memang sudah amat ramai sejak lama sekali. Gejala ini timbul seiring dengan semakin beragamnya masyarakat dan nilai-nilai moralnya.

Sebagai salah satu daerah yang terlewati jalur dari ibukota kota-kota lain di pulau Jawa, banyak dilalui kendaraan jenis besar (truk) yang mengangkut barang-barang produksi pulang dan pergi sepanjang hari. Para sopir truk dan kernetnya sering mampir ke warung-warung makan yang ada di sepanjang jalur jalan raya. Tujuan mereka tidak hanya untuk mengisi perut, seringkali mereka istirahat sambil bersantai dan ngobrol-ngobrol. Awalnya mereka ditemani gobrol beberapa orang wanita, penduduk setempat maupun pendatang, sambil minum minum beralkohol (bir). Dari sinilah mulai timbulnya praktek prostitusi, di mana tempat mereka bertemu dikenal dengan istilah "warung remang-remang".

Prostitusi memang sulit diberantaskan akarnya. Apabila praktek yang secara terang-terangan dapat diberantas, maka akan timbul lagi praktek yang sama secara terselubung. Masyarakat Klari sudah terbiasa dengan keadaan tersebut, dan menganggap itu sebagai hal yang wajar. Prinsip mereka, asalkan kegiatan tersebut tidak mengganggu aktivitas sosial dan ibadah mereka, tidak perlu diusik. Akan tetapi apabila praktek prostitusi itu mengganggu stabilitas dan ketenteraman penduduk, mereka mengajukan usulan keberatan kepada pemerintah daerah untuk menutup tempat-tempat semacam itu.

C. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Kepandaian dan ketrampilan seseorang merupakan modal utama meraih sukses di kemudian hari. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan masalah sumber daya manusia. Untuk itulah pentingnya pendidikan bagi setiap insan, agar dapat tercipta sumber daya manusia yang unggul, handal, serta trampil.

Pendidikan sangat mendapat perhatian dari pemerintah akhir-akhir ini, terutama dengan masuknya Indonesia dalam era industrialisasi. Untuk itu pemerintah telah mencanangkan berbagai program pendidikan sampai menjangkau ke pelosok daerah, dengan harapan semua warganegara Indonesia dapat mengenyam pendidikan.

Kemajuan dalam bidang pendidikan hendaknya juga sejalan dengan terbukanya peluang kerja yang seluas-luasnya, agar tidak timbul pengangguran secara besar-besaran. Pengangguran tercipta karena sempitnya peluang kerja, sedangkan tenaga-tenaga terdidik yang trampil dan siap pakai banyak tersedia. Oleh sebab itu bagi mereka yang tidak memperoleh kesempatan kerja, harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemajuan dalam bidang pendidikan juga merambah sampai ke kabupaten Karawang. Program-program pemerintah dalam bidang pendidikan sudah dilaksanakan, demikian pula pengadaan sarana dan prasarana penunjangnya. Meskipun demikian masih banyak kendala di sana-sini yang menghambat kemajuan sistem pendidikan. Dapat disebutkan beberapa kendala yang timbul, antara lain masalah biaya, lokasi sekolah yang jauh, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Masalah biaya memang merupakan kendala utama untuk berkembang sistem pendidikan. Seperti telah disebutkan, bahwa rata-rata penduduk setempat hanya mengandalkan nafkah dari

sektor pertanian sebelum masuknya industrialisasi. Kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh tani, dan hanya sedikit yang memiliki lahan sawah yang produktif. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa penghasilan yang mereka peroleh tidak terlalu besar dan tidak menentu. Apalagi kalau sampai terjadi gagal panen, praktis mereka tidak dapat menjual hasil sawahnya. Penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tidak ada yang dapat disisihkan sebagai persediaan untuk biaya pendidikan.

Keadaan semacam itu sudah terkondisi sejak beberapa generasi yang lalu. Orientasi kerja mereka hanya tertuju untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Oleh sebab itu di Kabupaten Karawang, termasuk Kecamatan Klari, dijumpai banyak orang tua yang buta huruf atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian pengetahuan dan ketrampilan mereka pun terbatas.

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan di segala bidang kehidupan, para orangtua menyadari perlunya pendidikan bagi anak-anak mereka. Tanpa bekal pendidikan yang cukup serta ketrampilan yang memadai, akan sulit bagi anak-anak mereka untuk mendapat pekerjaan yang memadai pula. Oleh sebab itu banyak orangtua yang bercita-cita menyekolahkan anak-anak mereka setinggi mungkin, walaupun keadaan ekonomi mereka pas-pasan. Biaya pendidikan sudah menjadi salah satu bagian dari anggaran rumah tangga mereka.

Masalah jarak juga menjadi kendala bagi kemajuan bidang pendidikan. Sekolah tingkat SD memang sudah ada sampai ke pelosok desa, tetapi sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA hanya ada di kota Kabupaten. Dengan demikian jika ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi harus pergi ke kota kabupaten, yang ada kalanya jaraknya sangat jauh dari desa-desa tertentu.

Sebelum sarana dan prasarana transportasi sebaik sekarang, anak-anak yang melanjutkan sekolah ke tingkat SLTP dan SLTA di Kabupaten Karawang harus berjalan kaki cukup jauh. Atau bagi mereka yang memiliki sepeda bisa memanfaatkan kendaraan itu pulang pergi. Sebagian besar waktu mereka habis di perjalanan. Hal ini menyebabkan mereka merasa enggan melanjutkan sekolah, dan lebih memilih tinggal di rumah membantu orangtua.

Dengan adanya kemajuan di bidang transportasi, lebih mudah dan cepat bagi anak-anak pergi dan pulang dari sekolah. Dengan mengeluarkan uang hanya Rp. 200,- (tarif untuk pelajar), mereka bisa pergi ke sekolah dan pulang ke rumah naik angkutan umum setiap hari. Jarak antara sekolah dengan rumah mereka pun dirasa lebih dekat. Kemudian dan kelancaran transportasi ini dapat memicu semangat belajar mereka, di samping adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Pemerintah tampaknya bersikap konsekuen dalam menggalakkan program pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Gedung-gedung sekolah, dari tingkat SD sampai SLTA, banyak didirikan dengan bantuan dana INPRES dan swasta, beserta pengadaan fasilitas proses belajar mengajar yang lengkap. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan, yang pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1. Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di sekolah-sekolah dapat dikatakan mengalami peningkatan. Namun masih banyak warga masyarakat yang belum sadar dan memahami betul arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka. Banyak di antara mereka yang hanya lulus SD atau SLTP sudah berhenti sekolah, dengan alasan utama tidak ada biaya. Dan mereka memutuskan untuk bekerja apa saja selepas dari

pendidikan tersebut. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat relatif masih rendah.

Dengan hanya berbekal pendidikan SD atau SLTP, belum dapat disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Apalagi tanpa memiliki suatu ketrampilan tertentu, sulit bagi mereka untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, secara kualitatif tenaga kerja yang berasal dari penduduk setempat dirasa belum memenuhi syarat. Para pengusaha jarang yang memanfaatkan tenaga kerja laki-laki dari penduduk setempat, bukan saja karena tingkat pendidikan mereka rata-rata memang rendah, juga karena mentalitas mereka yang dianggap masih dipengaruhi oleh kebudayaan agraris.

Orientasi pada budaya agraris yang masih dimiliki masyarakat di Kecamatan Klari memang sulit untuk dirubah. Hal ini disebabkan mereka secara turun-temurun telah terkondisi dan terikat dalam kebudayaan agraris. Baru belakangan ini saja industrialisasi masuk ke daerah ini, dan itu belum dapat merubah pandangan dan pola berpikir mereka karena belum dapat mereka terima sepenuhnya. Tampaknya masyarakat setempat belum begitu siap memasuki era industrialisasi dengan pola hidup yang berbeda dengan yang mereka miliki selama ini.

2. Kebutuhan Tenaga Kerja untuk Industri

Untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang bergerak dalam bidang industri tidak cukup hanya berbekal kekuatan otot saja. Namun kemampuan otak serta ketrampilan sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, demi menunjang kelancaran dan perkembangan industrialisasi itu sendiri.

Sekarang ini pemerintah menitikberatkan pemanfaatan tenaga kerja bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka mengantisipasi masuknya tenaga-tenaga kerja asing. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja yang terdidik, trampil, profesional, dan siap pakai. Banyak lembaga pendidikan serta kursus-kursus semacam Balai Latihan Kerja (BLK) yang didirikan untuk menciptakan insan-insan sebagai sumber daya manusia yang handal. Tidak sedikit pula penyuluhan-penyuluhan dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta guna mencapai tujuan tersebut.

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa di Kabupaten Karawang belum banyak didirikan lembaga-lembaga semacam itu. Masyarakat belum disiapkan sepenuhnya untuk tampil sebagai tenaga kerja profesional di bidang industri. Hal ini menyebabkan sulit merubah pola hidup agraris mereka menuju industrialisasi. Kalaupun mereka dapat bekerja di sektor industri, hanya menjadi buruh pabrik atau menempati posisi bahwa dari keseluruhan sistem industri. Belum ada seorang pun yang berhasil menduduki suatu posisi manajerial (pimpinan) dalam suatu perusahaan.

Memang, hampir semua pabrik yang ada membutuhkan banyak tenaga kerja sebagai pelaksanaan produksi (buruh). Untuk menjadi buruh, tidak harus melalui pendidikan yang tinggi dan memiliki ketrampilan, tetapi lebih mengandalkan kerapian, ketelitian, dan ketekunan dalam bekerja. Dengan demikian pihak perusahaan tidak perlu membayar mahal sebagai upah bagi tenaga kerja semacam itu. Asalkan pihak perusahaan membayar upah sesuai dengan upah minimum regional (UMR) yang berlaku di daerah bersangkutan, banyak tenaga kerja yang mau bekerja di perusahaan tersebut. Dan biasanya mereka tidak akan banyak menuntut, asalkan upah dan kesejahteraan karyawan mendapat perhatian dari pihak perusahaan.

D. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

1. Konsep dan Pengelolaan SDA

Sesungguhnya amat sulit untuk menggali sistem pengetahuan dan konsep masyarakat berkenaan dengan sumber daya alam yang mereka miliki. Apalagi untuk mencari padanan pengetahuan dan konsep lingkungan hidup mereka dengan bahasa dalam disiplin ilmu ekologi. Pendekatan terhadap sistem pengetahuan masyarakat berkenaan dengan konsep dan pengelolaan sumber daya alam yang mungkin lebih menjelaskan adalah pendekatan holistik yang berangkat dari aspek kehidupan subsistensi mereka. Aspek ini merupakan bagian dari unsur kebudayaan ekonomi mereka yang paling menentukan keberlangsungan hidup mereka sejak dulu sampai kini. Dalam hal ini adalah ekonomi subsistensi, yaitu kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan akan makan, yang terwujud dalam kegiatan pertanian pada umumnya.

Sebagai masyarakat petani maka unsur alamiah yang merupakan sumber daya alam yang paling berpengaruh terhadap ekonomi subsistensi mereka adalah tanah. Keberadaan tanah dalam sistem pengetahuan kosmologis masyarakat petani di Kecamatan Klari khususnya dan daerah Kabupaten Karawang umumnya dilihat sebagai bagian terikat erat dengan ketergantungan mereka kepada hasil produksi lahan pertaniannya, baik tanah yang diolah menjadi lahan sawah maupun lahan tanah kering atau perladangan dan perkebunan. Bagi mereka kemampuan tanam memberi hasil yang maksimum bagi pemenuhan kebutuhan subsistensi mereka merupakan wujud dari sumber daya alam yang paling utama. Sehingga tidak heran jika kesuburan tanah merupakan potensi sumber daya alam yang paling menjadi dambaan para petani tradisional ini. Selain padi, berbagai tanaman yang menghasilkan bahan makanan tambahan, serta barang kebutuhan hidup mereka umumnya berasal dari apa yang disediakan tanah. Tanah bukan saja menjadi tumpuan

harapan dari mana sumber bahan makanan "berasal", tapi juga memberi berbagai bahan baku untuk memudahkan kehidupan mereka. Misalnya tanah liat yang dapat dijadikan batu bata, bahan untuk membuat tungku di dapur, bahan untuk membuat wadah yang mudah dibentuk dan sebagainya.

Sedemikian dalamnya ikatan emosi masyarakat petani Karawang ini dengan tanahnya, sehingga tidak heran jika ikatan tersebut juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem religi asli mereka, dan terwujud secara terstruktur di dalam adat istiadat mereka. Salah satu mitologi suci Orang Sunda dan yang juga dipercayai oleh orang Jawa di daerah Karawang adalah tentang kaitan antara tanah dengan pengorbanan seorang dewi demi terciptanya makanan pokok, yaitu padi. Di dalam kebudayaan Jawa, dewi kesuburan tanah ini disebut Dewi Sri, sedangkan orang Sunda menyebutkan Nyi Pohaci Sanghyang Sri. Mitologi inilah yang mendasari berbagai upacara pemujaan terhadap sang adikodrati yang dianggap mampu menyuburkan tanah, atau sebaliknya menghukum manusia yang tidak lagi peduli dengan lingkungan lewat berbagai malapetaka, entah musim kering yang panjang, berjangkitnya hama, berjangkitnya penyakit menular, atau hasil panen yang sama sekali gagal. Petani-petani di pedesaan Karawang percaya bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatacara penyelenggaraan bercock tanam dan memelihara padi sejak dari masih di tangkainya di tengah sawah, sampai dengan penyimpanan di dalam lumbung dan bahkan pada saat menanak dan memakannya dapat menimbulkan akibat buruk bagi hasil panen berikutnya.

Sungguhpun semua petani di Kabupaten Karawang menyatakan diri secara formal memeluk agama Islam, akan tetapi sistem religi mereka secara keseluruhan merupakan pembauran antara ajaran monoteisme semitis (dalam hal ini ajaran Islam) dengan keyakinan animistis dan politeisme lama yang diwariskan oleh nenek-moyang mereka. Perilaku religi mereka menampakkan dengan jelas sinkretisme berbagai ajaran religius tersebut.

Orang Sunda dan orang Jawa di Karawang sebagian besar masih percaya kepada keberadaan sifat kegaiban adikodrati tertentu yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka, baik berupa kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda atau tempat-tempat yang memiliki ciri-ciri yang luar biasa dan menduduki fungsi vital bagi kehidupan, seperti pohon-pohon kayu besar dan tua, sumber-sumber mata air yang selalu mengalir walaupun di musim kemarau, batu-batu besar ditempat-tempat yang dianggap memiliki fungsi perlindungan alamiah termasuk kuburan-kuburan tua yang mencerminkan adanya suatu kehidupan di masa dulu. Keyakinan lama seperti itu ditandai pula oleh pemujaan dan pandangan disertai sikap hormat, takut dan takjub kepada "keberadaan" nenek moyang atau karib kerabat yang telah meninggal, tapi dianggap tetap bisa hadir berkat roh mereka yang selalu mengharapkan perhatian anak cucu dan kerabatnya yang masih hidup.

Petani Sunda di Kecamatan Klari, ataupun Karawang umumnya, memiliki adat melaksanakan kaulan, yaitu ritus penyampaian rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Esa dan khususnya kepada roh nenek-moyang dan kerabat yang telah meninggal. Biasanya upacara seperti ini dilaksanakan dalam satu rangkaian acara kenduri, yaitu mengadakan makan dan minum bersama dalam suasana paguyuban dengan sesama kerabat dan tetangga sekampung.

Kegiatan adat lain yang berhubungan dengan sistem keyakinan asli tersebut adalah **syukuran** yang disebut juga **hajat**, **hajatan** atau **selamatan**, yaitu ritus menyampaikan doa dan permohonan Kepada Yang maha Esa dan kepada roh leluhur untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Upacara selamatan ini dilakukan untuk menyambut peristiwa-peristiwa daur hidup tertentu, seperti perkawinan, menyambut kehamilan pertama, kelahiran bayi, pertumbuhan anak yang ditandai dengan pengenalan pertamanya dengan tanah

(upacara turun atau ijak tanah), memotong rambut untuk pertama kali, tumbuhnya gigi pertama, peristiwa sunatan, dan sehabis penyelenggaraan penguburan mayat.

Selamatan ini biasanya dilaksanakan pada sore hari Kamis malam Jum'at. Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang **modin** atau guru mengaji yang sering juga merangkap sebagai pewaris pengetahuan khusus mengenai tatacara menghormati roh leluhur. Tidak heran jika dalam upacara ini selain dibacakan doa-doa dalam bahasa Arab menurut keyakinan Islam, juga dibacakan mantera-mantera dalam bahasa Sunda Kuno untuk berkomunikasi dengan roh para leluhur. Ritus seperti ini selalu diakhiri dengan acara makan bersama **nasi tumpeng**, yaitu nasi yang dibentuk menyerupai gunung yang bagi sebagian orang dianggap sebagai simbol kesejahteraan yang diberikan alam kepada manusia.

Berkenaan dengan kajian tentang pengetahuan dan konsep petani karawang tentang sumber daya alam, yang penting diketahui dalam berbagai upacara dan adat istiadat tersebut adalah ungkapan tentang bagaimana kaitan emosi setiap pendukungnya kepada segala apa yang diberikan "bumi", yaitu tanah dan air, serta alam semesta secara keseluruhan. Dari itulah dapat pula di ketahui bahwa sesungguhnya para petani tersebut juga memiliki sistem pengetahuan tentang penggantian musim dengan segala gejala dan akibatnya, sehingga mereka memiliki "perencanaan" yang matang dalam menjalankan kegiatan pertaniannya. Didalam sistem pengetahuan ini mereka mengenal gejala-gejala alam seperti kedudukan matahari, posisi mata angin, arah dan kondisi tiupan angin, kondisi curah hujan, dan tingkat banjir yang di akibatkannya. Tentu saja pengetahuan seperti ini disertai dengan pengetahuan lain mengenai kondisi tanah, air, dan lingkungan fisik yang mengelilingi mereka secara keseluruhan.

Di dalam kebudayaan sunda dan jawa, pengetahuan khusus mengenai pergantian musim dan keadaan alam bagi kepentingan pertanian menurut perputaran waktu tersebut disebut pranatamangsa, atau tatanan waktu (mangsa-masa). Pengetahuan

ini sebenarnya merupakan kemampuan mengkatagorisasikan perputaran musim hujan dan kemarau menurut pembagian peredaran matahari selama dua belas bulan. Disini masa selama satu bulan diberi nama menurut bahasa Jawa/Sunda lama, yaitu: kasa, karo, katigo, kapat, kalima, kanem, kapitu, kawolu, kasanga, kadasa, desta, dan sada.

Para petani sunda dan Jawa di Karawang ini juga memiliki pengetahuan mengenai sistem peredaran bintang, yang terpenting di antaranya adalah kedudukan **Bintang Waluku** (disebut juga bintang Belantik atau Orion). Kedudukan bintang inilah yang mereka gunakan untuk menentukan waktu permulaan mengerjakan sawah. Apabila pada mangsa kanem (sekitar bulan Nopember menurut perhitungan barat) bintang Waluku pada waktu subuh kelihatan di ufuk timur, maka para petani menganggap telah tiba saatnya untuk mulai menggarap sawah-sawah mereka. Apabila pada masa Desta (sekitar bulan April) bintang Waluku pada waktu petang terlihat di ufuk barat, maka para petani menganggap telah tiba saatnya untuk menyimpan lagi luku (bajak) mereka; artinya telah selesai kegiatan bersawah, telah dipanen hasilnya. Setelah itu mereka masuk kemasa-masa untuk beristirahat dari bersawah, dan masuk ke kegiatan lain, seperti memperbaiki rumah, jalan dan tempat ibadah, ataupun menyelenggarakan upacara-upacara perkawinan, selamatan dan hajatan-hajatan, kaulan dan sebagainya.

2. Pelestarian SDA dan Kearifan Lingkungan

Ciri-ciri terpenting dari sistem pengetahuan dan konsep tentang lingkungan alam dan sumber daya alam tersebut di atas adalah eratnyanya kaitan emosi masyarakat kepada potensi lahan pertanian, sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan subsistensi mereka. Berkenaan dengan itu usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam tersebut juga mengacu kepada kepentingan jangka panjang mereka terhadap kemampuan lahan pertanian memberikan hasil bagi kelangsungan hidup mereka.

Secara filosofis konsep kelestarian sumber daya alam para petani Jawa dan Sunda umumnya dapat kita lihat dalam pandangan mereka tentang hubungan antara manusia dengan alam, bahwa "lingkungan alam bukanlah sesuatu yang harus ditundukkan, melainkan dihormati, dipelihara dan dirawat untuk kepentingan kehidupan itu juga". Secara implisit tersirat di dalam pernyataan ini bahwa manusia seharusnya berusaha memahami aturan serta hukum-hukum alam, agar memperoleh manfaat dari segala apa yang diberikan oleh alam. Dalam hal ini nampaknya kebanyakan petani Karawang menolak bahwa lingkungan alam dengan segala sumber dayanya tidak boleh dieskloitasi sampai habis dengan tidak mempertimbangkan sumber daya untuk masa depan. Sebaliknya sumber daya alam tersebut harus dipelihara, dan dirawat dengan sikap "hormat".

Sampai pada pernyataan terakhir di atas dapatlah kita ambil suatu kesimpulan, bahwa kearifan lingkungan tradisional para petani di Kecamatan Klari khususnya, dan Kabupaten Karawang umumnya (mungkin juga petani Sunda dan Jawa seluruhnya) berpedoman kepada usaha pelestarian sumber daya alam dengan cara mengolahnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diadakan dan yang berpedoman kepada sistem pengetahuan tradisional mereka mengenai lingkungan alam dan sumber daya alam. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa kita juga perlu memperhitungkan perubahan-perubahan kebudayaan yang juga telah melanda kehidupan para petani di daerah ini.

Sama seperti masyarakat petani di daerah lain, petani Sunda dan Jawa di wilayah Kabupaten Karawang juga tidak dapat dianggap masih sepenuhnya berpegang kepada kearifan lingkungan tradisional seperti di atas. Peralihan sistem pertanian irigasi tradisional kepada penerapan sistem pengairan modern, penggunaan pupuk, penggunaan bibit padi jenis unggul dan mekanisasi peralatan, serta sistem penanganan pascapanen sebenarnya telah merubah bukan saja pola tanam para petani, tapi juga sistem pengetahuan, konsep dan kearifan lingkungan mereka terhadap sumber daya alam. Cara-cara baru yang bersifat pertanian

intensif tersebut membuat petani mulai bersikap eksploitatif terhadap sumber daya alam, dan bukan tidak mungkin kearifan lingkungan mereka sekarang lebih ditentukan oleh pandangan mereka terhadap alam yang lebih berupa keinginan menundukkan alam agar memperoleh hasil semaksimal mungkin untuk kesejahteraan hari ini. Asumsi ini merupakan suatu hopotesa untuk memprediksikan arah perkembangan kebudayaan pertanian masyarakat Karawang berdasarkan gejala-gejala yang ada, dan tentu saja menuntut adanya tahap pengujian melalui serangkaian penelitian tahap selanjutnya.

BAB IV

ANALISA

A. POLA HUBUNGAN KOTA DAN DAERAH PENYANGGA

Ketergantungan kota besar kepada daerah-daerah penyangga di sekitarnya semakin besar dengan semakin besarnya kompleksitas kota tersebut. Karena kebudayaan kota metropolitan itu sendiri hanya mungkin timbul jika masyarakatnya memiliki faktor-faktor pendukung, seperti sumber daya alam, kemampuan teknologi, sistem ekonomi yang kuat, sistem politik yang mantap, sumber daya manusia yang cukup dan sebagainya. Faktor-faktor pendukung tersebut boleh saja diperoleh dari daerah sekitarnya, yaitu daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah penyangga.

Kota Jakarta sebagai kota metropolitan dimana tingkat ketergantungannya telah terasa sejak peranannya sebagai ibukota Republik Indonesia dikukuhkan secara resmi setelah proklamasi kemerdekaan. Sebagai pusat pemerintahan Jakarta memerlukan daya dukung lingkungan alam dan daya dukung lingkungan sosial dari daerah sekitarnya. Untungnya daya dukung bagi kelangsungan kompleksitas hidup kota besar demikian telah mengalir secara akumulatif jauh sejak Jakarta masih berupa pelabuhan dagang bagi kerajaan-kerajaan pedalaman Jawa Barat, dan semakin terbentuk selama kota ini dikuasai oleh Belanda dengan nama Batavia.

Jakarta sebagai ibukota, ditinjau dari sudut sosial, kebutuhan akan sumber daya manusia dapat dikatakan selalu terpenuhi, karena sebagai ibukota milik semua warganegara di republik ini semua orang bisa datang, menetap dan mencari kehidupan disini. Hanya dalam masalah kualitas sumber daya manusia akan terjadi penyelesaian dan persaingan secara alamiah, di mana hanya orang-orang yang mampu beradaptasi secara bebas dalam kemajemukan pola dan gaya hidup yang akan mampu bertahan. Sebagai akibatnya kualifikasi urban telah tersaring secara otomatis bahwa daerah pinggiran tidak sepenuhnya dapat dikatakan menyumbangkan sumber daya manusia bagi perkembangan kota metropolitan. Kenyataan ini dibuktikan secara nyata bahwa posisi dinamisator dan penggerak dinamika kehidupan urban tidaklah dipegang oleh penduduk asli ataupun oleh penduduk dari daerah penyangga sekitarnya. Tetapi penduduk Jakarta lebih banyak berasal dari daerah-daerah yang jauh letaknya bahkan banyak berasal dari antar pulau.

Berkenaan dengan penelitian ini dapat dikatakan, bahwa penyerapan sumber daya manusia oleh Jakarta terhadap daerah-daerah penyangga, seperti Karawang, jauh lebih sedikit di bandingkan dengan sumber daya alam yang diserapnya. Hal ini dibuktikan oleh rendahnya angka mobilitas penduduk keluar Karawang. Ternyata gemerlap kota metropolitan dan kekuatan daya tarik sentrifugalnya tidak berpengaruh besar kepada daerah-daerah penyangga. Kunci utama argumentasi ini adalah keberadaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah penyangga itu sendiri. Sungguhpun tidak ada diantara penduduk Karawang yang tidak mengenal Jakarta, karena hampir semua penduduk pernah bepergian ke ibukota yang jaraknya hanya sekitar 60 kilometer dari daerah mereka, serta adanya sarana transportasi yang lancar, namun amat sedikit penduduk Karawang yang pindah dan menetap di Jakarta.

Berbagai kesulitan hidup di kota besar menyebabkan orang Karawang yang pernah mencoba mengadu nasib di sana lebih suka kembali ke desanya dan memusatkan perhatian kepada

penggarapan lahan pertanian mereka. Sebaliknya karena potensi sumber daya alamnya yang demikian dibutuhkan oleh kota Jakarta, menyebabkan semakin banyak orang dari ibukota dan dari daerah-daerah lain masuk ke Kerawang untuk menetap dan berusaha. Hal ini ditandai oleh besarnya jumlah pendatang (yang terdaftar resmi) ke berbagai daerah di Kabupaten Karawang, terutama di kecamatan-kecamatan yang tergolong wilayah industri.

Gerap pembangunan nasional jangka panjang yang dijalankan secara terencana ternyata lebih dulu mendorong perkembangan fisik kota besar, antara lain karena perannya sebagai pusat pembuatan keputusan politik, ekonomi dan sebagai sumber orientasi penerapan teknologi. Gejala ini sama seperti prediksi ahli sejarah kebudayaan seperti Gordon Childe mengemukakan pendapatnya, bahwa kunci penentu dari tahap-tahap pertumbuhan kota sebagai wujud dari peradaban dapat dilihat dari tingkat perkembangan teknologi dan ekonominya (Childe, 1951). Sebaliknya daerah penyangga seperti Karawang semakin dipaksa untuk menjalankan peran sebagai pemasok sumber aya alam bagi kebutuhan pokok kota yang menjadi "patron", yaitu Jakarta karena Jakarta memegang potensi sebagai pusat orientasi bagi berbagai aktifitas kebudayaan dari daerah pinggiran seperti Karawang.

Berbagai data yang terkumpul di Bab II dan pengembangannya di Bab III menunjukkan, bahwa baik kebudayaan maupun aspek teknologi dan ekonomi yang menumbuhkan kota metropolitan Jakarta tidak mungkin berkembang seperti sekarang jika tidak didukung oleh sumber daya alam yang cukup dari daerah-daerah penyangganya. Sebagai pusat orientasi kebudayaan bagi daerah-daerah pinggiran (marginal) di sekitarnya, kota Jakarta memang memiliki daya sentrifugal yang menarik orang-orang untuk datang dan menetap di dalam kota. Tapi sumber daya alam yang ada di daerah mereka, terutama perannya sebagai daerah pertanian sawah yang menjadi "lambung padi nasional" menyebabkan penduduk Kabupaten

Kawawang kebanyakan lebih suka kembali ke desanya. Gejala yang bertolak belakang dengan urbanisasi tersebut semakin kuat dengan berkembangnya sebagian wilayah kabupaten Karawang menjadi daerah industri modern. Dalam hal ini berkenaan dengan terbukanya banyak lapangan kerja akibat dorongan dari timbulnya berbagai kegiatan industrialisasi. Sedangkan benturan untuk menyambut kesempatan ini hanya terjadi akibat tidak siapnya masyarakat Karawang dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk industrialisasi tersebut.

Sebenarnya pemberian peran dan fungsi kepada daerah Kabupaten Karawang sebagai daerah penyangga telah menyebabkan pemasukan masyarakat pedesaan ke sisi terpinggir perekonomian kota Jakarta, sehingga cenderung menyebabkan labilnya ekonomi di desa-desa dan makin mendekati desa-desa kedalam jangkauan daya eksploitasi kota. Desa-desa di karawang semakin mudah dijangkau dan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi kota Jakarta, sehingga bukan saja telah mempertinggi gerak mobilisasi penduduknya, tapi juga telah memaksa daerah pedesaannya untuk mengalihkan sumber-sumber daya alamnya untuk mendukung kehidupan kota Jakarta yang semakin tumbuh dan semakin membutuhkan sumber daya dari daerah sekitarnya.

Sementara itu pemekaran dan pertumbuhan di daerah pusat Jakarta tidak mungkin dilakukan tanpa adanya wilayah-wilayah pendukung seperti Kabupaten Karawang yang akan dieksploitasi demi kelangsungan sistem kehidupan kota Jakarta itu sendiri. Dengan demikian dapat dimaklumi, betapa dalam setiap proses pertumbuhan kota Jakarta, sejumlah daerah di sekitarnya yang memiliki sumber daya alam "diikat" sebagai daerah penyangga, yaitu dengan mengintervensi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebutuhan desa akan tempat pemasaran produknya dan pengadaan lapangan kerja melalui intervensi industrialisasinya.

Karawang termasuk ke dalam radius jangkauan pengaruh perkembangan kota metropolitan Jakarta, khususnya sebagai penyangga kebutuhannya akan sumber daya alam. Dengan kata

lain peranan Karawang sebagai daerah penyangga bagi kota Jakarta telah mengalami perubahan-perubahan yang tidak sedikit sejalan dengan semakin besarnya daya dukung sumber daya alam yang dibutuhkan Jakarta. Daerah Kabupaten Karawang sendiri sejak awal abad yang lalu telah dikenal sebagai salah satu "lumbung padi" di Jawa barat, berkat adanya lahan persawahannya yang produktif dengan dukungan dan pengembangan teknologi pengairan. Karena jaraknya yang relatif dekat serta memiliki akses transportasi yang lancar ke ibukota, maka surplus beras yang dihasilkan Karawang telah menjadi salah satu sumber daya alam vital yang dimanfaatkan penduduk Jakarta.

Peranan Karawang sebagai penghasil beras untuk memenuhi kebutuhan kota Jakarta bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi daerah ini mulai tumbuh sebagai daerah pertanian sawah irigasi sejak Abad ke-17, yaitu ketika sejumlah petani Jawa Timur ditempatkan di sana oleh Sultan Agung Haryokusumo dari Mataram. Sultan Agung ingin menjadikan Karawang sebagai basis pertahanan sekaligus sebagai daerah pemasok bahan makan bagi laskarnya yang akan mengepung Batavia. Menjadikan Karawang sebagai "lumbung padi" karena sampai pada masa sekarang daerah tersebut telah makin memantapkan peran menjadi daerah pemasok kebutuhan beras bagi kota Jakarta dan daerah lain di sekitarnya. Kenyataan di lapangan juga membuktikan bahwa Kabupaten Karawang juga sudah berperan sebagai daerah "satelit" bagi kota Jakarta. Karena di daerah ini sekarang telah banyak pula didirikan pabrik yang akan memasok berbagai barang industri dengan Jakarta sebagai pusatnya. Sebagian tanahnya diambil alih oleh pengusaha dari Jakarta untuk perumahan mewah, perumahan sederhana. Sebagian sumber daya alamnya dibawa ke Jakarta untuk mendukung pembangunan fisik, seperti pasir, batu kali, dan tanah liat yang diolah menjadi batu-bata dan genteng untuk pembangunan gedung kantor dan rumah di Jakarta.

B. MASA DEPAN DAERAH PENYANGGA

Walaupun daerah Kabupaten Karawang berhasil mempertahankan peranannya sebagai "lambung padi" nasional berkat usaha pembangunan sistem intensifikasi pertaniannya, namun penambahan penduduknya sendiri serta pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang disangganya saja, mendorong peningkatan pengeksploitasian sumber daya alamnya. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk tersebut bukan saja mendorong meningkatnya kebutuhan warga setempat akan bahan makanan, tapi juga kebutuhan kepada lapangan kerja yang dapat mengalihkan surplus permintaan kerja di bidang pertanian. Selain itu telah terjadi mobilitas gerak pindah penduduk yang tinggi dan cenderung bergerak dan mendorong gerak migrasi spontan ke daerah Karawang, yaitu berkat perkembangan sebagian wilayahnya menjadi kawasan industri.

Tidak heran jika perubahan struktur ekonomi Kabupaten Karawang dari kegiatan yang masih menitik-beratkan usaha mengolah bahan mentah ke arah struktur ekonomi yang mengarah kepada kegiatan menghasilkan barang jadi, dan disertai dengan perluasan usaha ekonomi, telah mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam, dan pada akhirnya semakin merubah lingkungan alamiah menjadi lingkungan buatan manusia. Kenyataan ini dapat dipahami, karena pertumbuhan penduduk Karawang dan daerah sekitarnya yang cukup tinggi telah mendorong meningkatnya penawaran tenagakerja. Masalah ini dipecahkan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan menyediakan lapangan kerja yang seimbang, baik di sektor yang telah lama tersedia seperti pertanian, maupun sektor yang terus dibangun dan dikembangkan, seperti industri, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan lain-lain.

Sementara itu keterbatasan kesempatan dan lapangan kerja telah mendorong orang yang berasal dari daerah lain yang lebih padat penduduk, termasuk dari kota Jakarta sendiri, untuk mencari lahan baru sampai ke Kabupaten Karawang. Akibatnya

adalah meningkatnya tekanan pada sumber daya alam yang sebenarnya adalah meningkatnya tekanan pada sumber daya alam yang sebenarnya sudah cenderung digarap secara maksimal. Tapi dalam kasus ini, walaupun para pembuat kebijakan pembangunan sudah menyadari, bahwa tekanan pada sumber daya alam bermula dari pertambahan jumlah penduduk melebihi daya dukung yang sudah ada, namun usaha mengendalikan pertambahan penduduk migrasi spontan ke Karawang sangat sulit dilaksanakan.

Sementara itu pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan para pembuat kebijakan pembangunan setempat dihadapkan pula kepada masalah bagaimana memelihara keutuhan fungsi sumber daya alam. Bagaimana mengembangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, baik dengan mengelola keberlanjutannya, mengendalikan pencemaran dan pengrusaknya, mencegah terjadinya penyusutan persediaan sumbernya, menjaga agar tingkat regenerasi sumber tersebut tidak terlampaui, menggunakan cara-cara pengelolaan sumber daya alam yang efisien, serta pengendalian limbah bahan beracun dan berbahaya. Tekanan pengeksploitasian terhadap tanah, mengakibatkan munculnya wilayah lahan kritis yang tidak mampu lagi menumbuhkan tanaman. Termasuk dalam kategori ini areal bekas penambahan tipe dan penampungan bahan mineral, dimana tanahnya rusak parah dan menderita sehingga berubah menjadi lahan kritis.

Dalam masalah pelestarian dan pengolahan mengolah sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ini peranan masyarakat dan pemerintah daerah setempat sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan. Lingkungan Nomor 4 tahun 1982, dimana masyarakat berhak berperanserta dalam pengembangan lingkungannya. Karena itu sangat penting adanya pemberian kesempatan bagi peranserta masyarakat dalam mengembangkan lingkungannya, antara lain melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi menyerahkan usaha pelestarian

lingkungan daerah penyangga seperti Karawang ini kepada masyarakat sama saja dengan membuat kebijakan yang tidak bijaksana. Masalahnya sekarang lingkungan dan sumber daya alam daerah Kabupaten Karawang tidak lagi semata-mata menjadi tanggungjawab dan dinikmati oleh masyarakat yang berlatar belakang budaya petani dan penduduk asli, tetapi haruslah dibebankan kepada tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam Karawang.

Kebijakan pembangunan lingkungan dengan prinsip kemitraan di daerah ini juga belum dapat diwujudkan demikian saja tanpa mempersiapkan masyarakat yang berwawasan lingkungan terlebih dulu. Seperti telah disebutkan di bagian akhir Bab III, bahwa masyarakat petani Karawang memang memiliki sistem pengetahuan dan konsep lingkungan yang berorientasi kepada ekonomi subsistensi, dalam hal ini pertanian, akan tetapi pengetahuan dan konsep lingkungan dan sumber daya alam tradisional tersebut telah banyak mengalami dan sumber daya alam tradisional tersebut telah banyak mengalami perubahan sejak masuknya sistem pertanian yang lebih mengarah kepada industri pertanian (ditandai dengan intensifikasi, seperti sistem irigasi modern, pemakaian pupuk kimia, bibit unggul, mekanisasi dan teknologi pengolahan pascapanen). Sementara itu sistem pengetahuan dan konsep lingkungan modern yang lebih cocok dengan gerak pembangunan industrialisasi sekarang sama sekali belum mereka kenal. Oleh karena itu pembebasan kewajiban dan tanggungjawab kelestarian lingkungan kepada masyarakat petani yang sedang berubah ini sangat tidak layak. Kecuali jika sistem pengetahuan lingkungan modern dapat disosialisasikan ke dalam kehidupan mereka melalui berbagai program pelatihan dan pemahaman AMDAL.

BAB V

KESIMPULAN

Pada hakekatnya kebudayaan itu merupakan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan dalam arti luas. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya manusia berusaha melihat, memahami, dan memilah-milah gejala untuk kemudian merencanakan tindakan dan menentukan sikap serta perbuatan yang menghasilkan karya. Pada mulanya manusia menanggapi lingkungan itu dengan coba-coba (trial and error) dan karena itu cepat lambatnya perkembangan suatu kebudayaan tergantung dari sedikit banyaknya umpan balik yang dapat ditangkap oleh akal manusia dalam menanggapi tantangan dari lingkungan (Budhisantoso, 1989).

Dalam kajian mengenai perubahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah penyangga seperti Kabupaten Karawang ini proposisi ilmiah di atas membuktikan dengan baik, bagaimana masyarakat setempat juga berusaha menyesuaikan pola kebudayaannya dengan perubahan-perubahan lingkungan. Sejak dari awal sejarah pertumbuhannya menjadi "lumbung padi" Jawa Barat dan sekarang juga untuk tingkat nasional, masyarakat di daerah yang sekarang disebut Kabupaten Karawang telah mengalami berbagai tahap penyesuaian diri dengan berbagai strategi adaptasi. Perubahan usaha-usaha

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Karawang sekarang juga masih merupakan bagian dari hasil tanggapan *trial and error* tersebut. Kita hanya dapat mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana kondisi perubahan sekarang dengan memperhatikan apa-apa saja unsur yang berubah dan bagaimana proses perubahan tersebut.

Ada baiknya kita ungkapkan kembali masalah penelitian, yaitu tentang "apa saja bentuk daya dukung alamiah yang dimiliki Karawang, dan bagaimana dampak perubahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah Karawang terhadap perannya sebagai daerah penyangga bagi kota Jakarta. Secara ekologis yang dihadapi adalah masalah apakah daya dukung alam Karawang masih dapat menjadikan sebagai daerah penyangga, atau sebaliknya telah sampai kepada batas daya dukung yang hanya bisa ditolerir untuk kebutuhan habitatnya sendiri".

Berkenaan dengan permasalahan diatas, maka jawaban dapat kami berikan melalui empat proposisi pokok. **Pertama** mengenai apa saja bentuk-bentuk sumber daya alam di daerah penyangga ini. Berdasarkan gambaran umum pada Bab II jelas sekali bahwa pola kebudayaan masyarakat Karawang yang berorientasi kepada pertanian lahan sawah ini sangat tergantung kepada potensi tanah, atau bumi sendiri, sebagai sumber daya alam utamanya. Peran tanah sebagai sumber daya alam utama bagi masyarakat petani tentu tidak mungkin tanpa dukungan air sebagai sumber daya alam kedua yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian lahan persawahan mereka. Dalam hal ini perlu dicatat tentang bagaimana masyarakat Karawang telah mengelola sistem irigasi dengan membendung air sungai Citarum sejak dibukanya daerah itu oleh laskar Mataram pada abad ke -16 dulu. Usaha tersebut terus berlanjut sampai sekarang, yaitu dengan dibangunnya bendungan-bendungan modern yang lebih besar kapasitasnya, sehingga bisa mengairi lahan persawahan yang lebih luas lagi.

Didalam uraian terdahulu telah disebutkan, bahwa tidak semua lahan pertanian di Karawang memiliki potensi sebagai lahan produktif, karena tetap ada sebagian daerah yang tidak mungkin diairi oleh air dari bendungan Sungai Citarum. Sementara itu selain potensi tanah sebagai unsur pokok perwujudan kehidupan pertanian, juga terhitung kandungan-kandungan mineral di dalamnya yang dapat pula dimanfaatkan sebagai sumber daya lain bagi kesejahteraan hidup manusianya. Misalnya tanah liat yang dibuat menjadi batu bata dan genteng sebagai bahan bangunan, atau dibuat menjadi wadah-wadah berbentuk gerabah untuk kemudahan hidup sehari-hari. Selain itu juga terdapat kandungan pasir, batu kali, batu kapur, dan kaolin yang baru mendapat peran sebagai sumber daya alam berpotensi komoditi pada masa sekarang.

Kedua, mengenai perubahan upaya pemanfaatan dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah Kabupaten Karawang. Kunci utama dalam pernyataan kita adalah konsep tradisi, industri modern, pembangunan, dan perkembangan sosial-budaya. Di mana telah terjadi perubahan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang semula berorientasi kepada kebudayaan agraris tradisional kepada cara-cara yang lebih berorientasi kepada kebudayaan industri modern. Sistem pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam agraris tradisional ditandai oleh aspek ekonominya yang lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi dan dilaksanakan melalui rekayasa sosial-budaya masyarakat yang terikat oleh azas primordialisme, paguyuban, dan kekeluargaan. Pada masa itu sumberdaya alam yang ada dimanfaatkan dan dikelola hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan pokok bagi setiaparganya.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Kabupaten Karawang yang terbukti sangat menguntungkan bagi kepentingan kesinambungan pasok pangan nasional, telah mendorong timbulnya akumulasi usaha agar tingkat surplus makin besar dan

terus membesar. Untuk sejak zaman Belanda telah dimulai usaha memodernisir pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pertanian di daerah ini. Sistem pemanfaatan dan pengelolaan alam yang mengacu kepada agroindustri modern yang terjadi sekarang ditandai oleh : usaha pertanian yang mengarah kepada peningkatan surplus; digunakannya sistem irigasi modern, digunakan bibit unggul yang dapat ditanam berkali-kali dalam setahun, digunakannya alat-alat mekanis, dan dimanfaatkannya sistem pengetahuan pertanian modern menggantikan sistem pengetahuan pertanian tradisional.

Ketiga, adalah munculnya pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di luar sektor pertanian, yaitu sektor perindustrian modern. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri di Kabupaten Karawang ini antara lain; letaknya yang relatif dekat dengan DKI Jakarta, dihubungkan oleh berbagai kemudahan transportasi darat modern, tersedianya lahan yang cukup luas dan tidak mengganggu potensi produktifitas pertanian tanaman pangan, adanya sejumlah sumber daya alam berupa barang tambang tipe C yang sangat mendukung pembangunan fisik industri, dan tentu saja karena tersedianya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang dibayar murah.

Jadi pada zaman dulu, paling tidak sebelum maraknya pembangunan industri (dengan segala komponennya), Karawang merupakan daerah penyangga bagi Jakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan penduduk ibukota itu terhadap makanan pokok, yaitu beras. Selanjutnya di masa kini peran dan fungsi sebagai penyangga bagi kota Jakarta bukan hanya sebagai pemasok bahan makanan, tetapi juga sebagai daerah satelit di mana industri dan masyarakat industri yang berbasis di Jakarta dapat mengembangkan pengeksploitasian sumber dayannya.

Keempat, mengenai masalah apakah daya dukung alam Karawang masih dapat menjadikannya sebagai daerah penyangga, atau sebaliknya telah sampai ke ambang batas daya dukung yang

hanya bisa ditolerir untuk memenuhi kebutuhan hebitatnya sendiri. Dari sektor pertanian dapat dikatakan potensi sumber daya alam Kabupaten Karawang telah termanfaatkan secara maksimal. Dalam arti usaha perluasan lahan pertanian irigasinya tidak mungkin lagi ditambah, mengingat dukungan debit air sungai yang ada juga sudah sampai ke ambang batasnya. Malah tekanan industri cenderung makin mengurangi luas lahan pertanian yang ada. Sedangkan usaha peningkatan intensifikasi nampaknya juga sudah sampai pada tingkat maksimum.

Sektor industri memang sedang mendapat angin di Kabupaten ini, karena lahan dan sumber daya primer (seperti air, listrik, dan BBM) cukup tersedia. Namun disinilah bermulanya dampak lingkungan yang secara tidak langsung dapat menggoyahkan bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga sektor industri itu sendiri. Pertama pembangunan lahan yang tanpa kendali adpat mencaplok lahan-lahan pertanian produktif, atau lahan-lahan yang dicadangkan untuk pengembangan pertanian; baik karena digunakan untuk lokasi pabrik, maupun untuk perumahan karyawan, perumahan mewah, pertokoan, dan tempat rekreasi. Kedua adalah pengurasan sumber daya alam berupa air tanah, air sungai dan barang tambang, yang berdampak pada kelangkaan sumber daya untuk mendukung kebutuhan jumlah penduduk yang semakin banyak. Ketiga adalah dampak pencemaran lingkungan yang dapat merusak kelestarian lingkungan sekaligus mempercepat pelemahan daya rentan lingkungan, seperti: pencemaran air sungai dan air tanah akibat limbah pabrik yang tidak didaur ulang; pencemaran akibat sisa-sisa produksi yang dibuang sembarangan; pencemaran akibat gas buang dan zat-zat kimia yang merusak ozon dan mencemari udara; pencemaran akibat limbah rumah tangga yang tidak dikelola sebagaimana mestinya pemukiman modern.

Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa perubahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di daerah Kabupaten Karawang sebagai penyangga kota metropolitian Jakarta adalah bagian dari perubahan kebudayaan masyarakat dari agraris tradisional kepada

masyarakat industri modern. Di mana dalam hal ini masyarakat dan lingkungan alam Karawang merupakan penyangga bagi pembesaran kota metropolitan Jakarta. Sementara itu daya dukung alamiah yang dimiliki Karawang dapat mentolerir tingkat eksploitasi yang dilakukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah induknya, yaitu Jakarta.

KEPUSTAKAAN

Budhisantoso, Subur

- 1977 *Keluarga Matrifokal: Sebuah Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.*
Disertasi di Universitas Indonesia, Jakarta.

Childe, Gordon K

- 1951 *Man make Himself.* A Mentor Book, New York.

Forbes, Dean K

- 1983 *Geografi Keterbelakangan :Sebuah Survei Kritis.*
Jakarta : LP3ES.

Heintzeman, Oliver H. and Richard M. Highsmith

- 1967 *World regional Geograpy*, Thrid Edition. Pretice-Hall
Inc. New Jersey

Hoebel, E. Adamson

- 1958 *Man in the Primate World*, McGraw-Hill Book
Company, New York

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup

- 1995 *Kemitraan Nasional Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.* Hasil Rapat Koordinasi Nasional I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta

Muller, Herbert J

- 1958 *The Loom of History*, A Mentor Book, New york.

Ricklefs, Robert E.

- 1979 *ECOLOGY*, Second Edition, Chiron Press, New York

Rimmer, PJ and Dean K. Forbes

1982 "Underdevelopment Theory: A Geographical Review",
in *Australian Geographer*, 15,4, 192-211

Roston, W.W.

1958 "The Take-off into Self-sustained Growth", dalam AN
Argawala dan SP Singh(eds.) *The Economic of Under-
development*. Oxford University Press, Delhi.

Rusyana, Yus dkk

1988/1989 *Pandangan Hidup Orang Sunda: Seperti tercermindalam
kehidupan masyarakat dewasa ini* (TahapIII). Proyek
Penelitian dan Pengkajian KebudayaanNusantara,
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional,Depdikbud,
Jakarta

LAMPIRAN I
DAFTAR INFORMAN

Nama	Umur (Thn.)	Pendidikan	Pekerjaan/Jabatan
H. Nata Permana	54	SMP	Kepala Desa Walahar Kec. Klari
Ahmad S.	36	SMA	Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Desa Walahar, Kecamatan Klari
Endang Wiryo	51	SMP	Kepala Desa Belendung Kec. Klari
T Hermawan Syarif	37	Sarjana Muda	Kepala Bagian Pelayanan Umum, Kantor Kec. Klari
H.M. Agus	45	SMP,	Kepala Desa Anggagita, Kec. Klari
H. Ridwanta	50	SMA	Kepala Desa Gintungkerta, Kec. Klari
Ande	31	SD,	tani, Kampung Cibuluh, desa Walahar, Kec. Klari
Kamal	45	SD	tani, Kampung Cibuluh, Desa Walahar Kec. Klari
Adang Wihana	35	SD	tani Desa Belendung Kec. Klari
Komarudin	29	SD	tani/dagang. Desa Belendung Kec. Klari
H. Sopandi	50	SD	tani/pengusaha bata Desa Belendung Kec. Klari
Sutarman	33	SD	tani/pekerja bata Desa Belendung Kec. Klari

LAMPIRAN II

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

1. Identifikasi Daerah Penelitian (pengamatan dan data sekunder)
 - a. Letak administratif daerah penelitian
 - b. Letak geografis daerah penelitian
 - c. Kondisi lingkungan alam setempat
 - d. Pola pemukiman setempat
 - e. Sarana transportasi
2. Kependudukan (data sekunder)
 - a. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan selama 10 tahun terakhir
 - b. Mobilitas penduduk keluar dan masuk
 - c. Jumlah penduduk pendatang (kalau ada)
 - d. Komposisi penduduk menurut suku bangsa (kalau ada)
3. Sosial-Ekonomi (wawancara, pengamatan, dan data sekunder)
 - a. Interaksi sosial sehari-hari : individual atau paguyuban?
 - b. Kepemimpinan : formal dan birokratis, atau informal dan kekeluargaan?
 - c. Kekerabatan : keluarga luas bilineal menurut adat setempat, atau mengutamakan bentuk keluarga inti? Pola menetap setelah menikah, pola pengasuhan anak
 - d. Mata pencaharian pokok dan sampingan
 - e. Keadaan industri rakyat dan industri rumah tangga
 - f. Keadaan industri padat karya dan padat modal
 - g. Hubungan ekonomi kota-desa
4. Sumber Daya Alam
 - a. Apa saja sumber daya alam yang terdapat di lingkungan setempat?
 - b. Sumber daya alam apa yang dieksploitasi untuk menyanggah kebutuhan kota?
 - c. Bagaimana tingkat perkembangan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dari tahun ke tahun

- d. Bagaimana sistem pengelolaan dan pemanfaatannya pada masa tradisional?
 - e. Bagaimana sistem pengelolaan dan pemanfaatannya pada masa kini?
 - f. Sumber daya alam apa saja yang telah sampai pada ambang batas dan rusak kelestariannya?
 - g. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan masyarakat, swasta dan pemerintah berkenaan dengan kelestarian sumber daya tersebut?
5. Pembangunan Industrialisasi
- a. Industri apa saja yang terdapat di daerah penyangga ini?
 - b. Sumber daya apa saja yang dimanfaatkan oleh industri-industri tersebut?
 - c. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan sumber daya oleh industri demi terjaganya kesinambungannya?
 - d. Bagaimana industri-industri tersebut memanfaatkan sumber daya manusia dari penduduk setempat?
 - e. Bagaimana bentuk interaksi sosial antara pengusaha dengan buruh?
6. Dampak Pengeksploitasian sumber daya alam
- a. Apa pengaruh pengeksploitasian sumber daya alam tertentu terhadap lingkungan setempat?
 - b. Apa pengaruh pengeksploitasian sumber daya alam tertentu terhadap kehidupan sosial budaya setempat?
 - c. Apa pengaruh pengeksploitasian sumber daya alam tertentu terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat?
 - d. Bagaimana masyarakat menghadapi tekanan lingkungan akibat berkurangnya sumber daya alam tertentu?
7. Mobilitas Sosial Penduduk
- a. Seberapa tinggi tingkat peralihan penduduk dari daerah setempat ke kota? Apa sebab-sebab urbanisasi tersebut?
 - b. Seberapa tinggi tingkat penambahan penduduk pendatang, dan apa saja yang menyebabkan mereka menetap di daerah ini?
 - c. Bagaimana bentuk hubungan sosial antar golongan etnik yang ada?

8. Perkembangan pendidikan
 - a. Jenis-jenis sekolah yang ada di daerah ini dan perkembangan jumlah murid selama sepuluh tahun terakhir
 - b. Jenis sekolah apa saja yang paling banyak peminatnya?
 - c. Adakah korelasi antara pertumbuhan industri dengan jumlah sekolah kejuruan setempat.

9. Pandangan Masyarakat terhadap sumber daya alam
 - a. Bagaimana konsep masyarakat tentang sumber daya alam?
 - b. Bagaimana pandangan mereka mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut?
 - c. Bagaimana usaha mereka untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut?
 - d. Apakah ada sistem pengelolaan sumber daya alam secara tradisional yang dapat dijadikan contoh kearifan lingkungan setempat?

10. Pandangan Masyarakat terhadap perubahan lingkungan
 - a. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan lingkungan akibat pengeksploitasi sumber daya alam mereka?
 - b. Bagaimana mereka mengantisipasi perubahan lingkungan agar kehidupan mereka yang adaptif tetap berlangsung?

